

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2005-2017 BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

SitiNurjanah

NPM : 1451010255

Program Studi :EkonomiSyariáh

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI LAMPUNG RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018**

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2005-2017 BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh

SITI NURJANA

NPM :1451010255

Program Studi : Ekonomi Syaria

Pembimbing I : Hj. Mardiyah Hayati, S.P., M.S.I

Pembimbing II : Gustika Nurmalia M.Ek

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2018

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari hasil kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan perekonomian dilakukan dengan cara pembangunan ekonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan kemampuan daerah masing-masing dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai seluruh Pengeluaran Pemerintah dalam memenuhi perbaikan sarana publik dan kegiatan ekonomi sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

Rumusan masalah penelitian: 1) Bagaimana pengaruh PAD dan Pengeluaran Pemerintah secara Parsial dan Simultan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2016? 2) Bagaimana Analisis PAD dan Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2016 berdasarkan perspektif ekonomi Islam?.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa 1) Pengaruh PAD dan Pengeluaran Pemerintah secara Parsial dan Simultan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2016. 2) PAD dan Pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2016 berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Data Publikasi BPS Provinsi Lampung. Populasi penelitian ini adalah data PAD, Pengeluaran Pemerintah dan PDRB dengan sampel 12 tahun (2005-2016). Analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda yang diolah dengan *Eviews-9*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung. 2) Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung. 3). PAD dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung. 4). PAD dalam perspektif ekonomi Islam dijelaskan *Q.S At-Taubah:11* tentang Zakat untuk menetapkan sumber penerimaan Negara dan pada Pengeluaran pemerintah dijelaskan *Q.S Al-Isra:26* tentang Harta yang diolah oleh Negara melalui *Baitul Mal* didistribusikan kepada yang berhak dan larangan pemborosan pada harta itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam yaitu *Khilafah* yang berarti bertanggung jawab sebagai pemegang amanah Allah dimuka bumi dalam mengelola PAD dan mendistribusikan Pengeluaran Pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan sosial secara adil dan merata untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan *QS Al-A'raff:96* tentang rizki yang Allah berikan kepada umatnya.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Ekonomi Islam.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2016 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.**
Nama : **Siti Nurjanah**
NPM : **1451010255**
Jurusan/Fakultas : **Ekonomi Syaria'h/Ekonomi dan Bisnis Islam**


MENYETUJUI


Untuk di munaqosyahkan dan di pertahankan dalam siding Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I
NIP. 19760529 200801 2010


Gustika Nurmalia, M.Ek.
NIP.

Ketua Jurusan Ekonomi Syaria'h


Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 19750042 420021 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-

2017 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam disusun oleh : **Siti Nurjanah**

NPM : 1451010255 Jurusan : **Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada

Hari/Tanggal : Senin/31 Desember 201

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

: Any Eliza, S.E., M.Ak


(.....)

Sekretaris Sidang

: M. Yusuf Bachtiar, M.E


(.....)

Penguji I

: Femei Purnamasari, S.E., M.S.I


(.....)

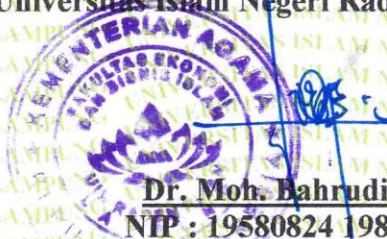
Penguji II

: Gustika Nurmalia, M.Ek


(.....)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag
NIP : 19580824 198903 1 003

MOTTO

غِي وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ الْقُرْبَىٰ ذِي وَائْتَايَ وَالْإِحْسَنَ بِالْعَدْلِ يَا مُرَّةَ اللَّهِ إِنَّ

تَذَكُّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْب

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl Ayat 90)





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung 35131

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurjanah
NPM : 1451010255
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 31 Desember 2018

Penyusun

Siti Nurjanah

NPM.1451010255

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa Syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orangtua saya Bapak Fachry Amal Hutagalung dan Ibu Lilis yang saya hormati, sayangi dan saya banggakan. Selalu menguatkan sepenuh jiwa raga, merawat dan memotivasi saya dengan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa, serta mendoakan saya agar selalu dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan disetiap langkahnya.
2. My little prince Alifa Kesya Azahra yang senantiasa memberi semangat setiap harinya.
3. Dhedhy Hermawan, S.ST yang telah banyak sekali membantu dalam segala hal sejak pertama memasuki perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung hingga sekarang. Terimakasih atas segala do'a, semangat, dukungan dan motivasi yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya, maju dan berkualitas dalam melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Siti Nurjanah, dilahirkan di kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Mei 1994. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Fachry Amal Hutagalung dan Ibu Lilis. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu:

1. Taman Kanak-kanan Kartini Bandar Lampung lulus pada tahun 2001.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawalaut Bandar Lampung lulus pada tahun 2007.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Bandar Lampung lulus pada tahun 2010.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Bandar Lampung lulus pada tahun 2013.
5. Selanjutnya, penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SBMPTAIN) pada tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan untuk Nabi Muhammad SAW para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana Satu (S1) jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa memberikan arahan serta motivasi kepada penulis.
3. Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Gustika Nurmalia M.Ek yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan dan motivasi kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang sangat bermanfaat hingga dapat menyelesaikan studi.
6. Pimpinan dan Karyawan perpustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung yang telah memberikan informasi, data referensi dan lain-lain.

Bandar Lampung, Desember 2018

Siti Nurjanah

NPM : 1451010255



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Batasan Masalah.....	24
E. Rumusan Masalah	25
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	25
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Pertumbuhan Ekonomi	
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	28
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi	28
3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	30
4. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam	31
B. Konsep Pendapatan Asli Daerah	
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	35
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	35
3. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	39
C. Konsep Pengeluaran Pemerintah	
1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah.....	43
2. Struktur Belanja Daerah.....	44
3. Teori Dasar Pengeluaran Pemerintah.....	48
4. Pengeluaran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam	51
D. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	
1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	54
2. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	57

3. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pengeluaran Pemerintah	58
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	59
E. Kajian Pustaka.....	60
F. Kerangka Berfikir.....	65
G. Hipotesis.....	67

BAB II METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	
1. Jenis penelitian	73
2. Sifat penelitian.....	73
B. Jenis dan Sumber Data	74
C. Teknik Pengumpulan Data.....	74
D. Populasi dan Sampel	75
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian	
1. Variabel Terikat (Dependen).....	75
2. Variabel Bebas (Independen)	76
F. Analisis Data	
1. Uji Asumsi Klasik	
a. Uji Normalitas	78
b. Uji Autokorelasi	79
c. Uji Heteroskedastisitas	79
d. Uji Multikolinieritas	79
2. Pengujian Hipotesis	
a. Uji t-Statistik.....	80
b. Uji F Statistik.....	80
c. Koefisien Determinasi	81
3. Uji Regresi Linier Berganda	81

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung	
1. Sejarah Singkat Provinsi Lampung	83
2. Letak Geografis Provinsi Lampung	83
3. Potensi Pengembangan Wilayah	84
4. Tinjauan Ekonomi Provinsi Lampung	85
5. Sarana dan Prasarana Provinsi Lampung	85
B. Analisis Data	
1. Hasil Uji Asumsi Klasik	
a. Uji Normalitas	87
b. Uji Multikolinieritas	88
c. Uji Autokorelasi	88
d. Uji Heteroskedastisitas	89

2. Analisis Regresi Linier Berganda	89
3. Hasil Uji Hipotesis	
a. Uji Signifikan Parsial (Uji t).....	91
b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)	92
c. Uji Koefisien Determinasi	93
C. Pembahasan	
1. Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017.....	94
2. Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017.....	99
3. Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017	103
4. Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.....	105
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	117
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel

1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2005-2017	12
2. Data Laporan Realisasi dan Pertumbuhan Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005-2017	14
3. Data Laporan Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005-2017	17
4. Daftar Operasional Variabel Penelitian	77
5. Hasil Uji Normalitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017	87
6. Hasil Uji Multikolinieritas Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017	88
7. Hasil Uji Autokorelasi Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017	88
8. Hasil Uji Glejser Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017	89
9. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Kerangka Pemikiran Penelitian Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017	67
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Lampung Tahun 2005-2017
Lampiran 2	Data Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2017
Lampiran 3	Data Laporan Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Jenis Belanja Tahun 2005-2017
Lampiran 4	Data Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah , Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Lampung Tahun 2005-2017
Lampiran 5	Data Natural Logaritma (LN) Pendapatan Asli Daerah , Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Lampung Tahun 2005-2017
Lampiran 6	Hasil Output Uji Asumsi Klasik
Lampiran 7	Hasil Output Analisis Regresi Berganda

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Adapun judul penelitian yang akan penulis susun adalah **“ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2017 BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian tersebut, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang ada didalamnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut :

- 1. Analisis** adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹
- 2. Pengaruh** adalah kekuatan yang ada dan timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang.²

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.244

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan VII, Edisi IV, Penerbit Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.1053

- 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)** yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³
- 4. Pengeluaran Pemerintah / Belanja Daerah** adalah alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), anggaran tersebut setiap tahunnya akan disalurkan ke berbagai sektor atau bidang yang menjadi prioritas pemerintah dengan tujuan umumnya adalah untuk mencapai kesejahteraan .⁴
- 5. Pertumbuhan Ekonomi** adalah upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.⁵
- 6. Ekonomi Islam** adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu lokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka sesuai dengan *Maqashid*, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat.⁶

³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* edisi revisi, (Jakarta: PT.Grafindo Persada,2013), h.14

⁴Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan , *Kajian Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Perekonomian Regional : Provinsi Kepulauan Riau*, h.7

⁵Rahardjo Adisasmita, *Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*: Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013), h.1

⁶Sumar'in,*Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.11

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka maksud dari penegasan judul diatas adalah menganalisa dan menggambarkan bagaimana pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dipandang dari sudut Ekonomi Islam

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yg menjadi alasan penulis dalam menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Sebagaimana kita ketahui setelah adanya desentralisasi setiap daerah diwajibkan untuk mandiri. Dengan adanya kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah, setiap daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan daerahnya selama kewenangan itu tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu setiap daerah berlomba-lomba untuk mengembangkan potensi daerahnya guna mencapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah pun terealisasikan pada sektor-sektor usaha, pembangunan wilayah atau infrastruktur dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah dalam merancang pembangunan ekonomi di daerahnya. Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung yang dikelola oleh pemerintah setiap tahunnya terus

mengalami kenaikan namun pada laju pertumbuhan provinsi Lampung sendiri mengalami penurunan selama 2 periode yaitu di tahun 2008-2009 dan penurunan selama 3 periode berturut-turut terjadi pada tahun 2012-2014 hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tidak stabil. Dalam hal ini apakah Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah yang belum dapat secara maksimal memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung.

Kondisi suatu perekonomian daerah setiap tahunnya dapat diketahui dari beberapa indikator salah satu nya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Sehingga peneliti ingin meneliti apakah Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017 dan secara perspektif Ekonomi Islam.

2. Alasan Subjektif

- 1) Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis jalani saat ini yakni berkenaan dengan Ekonomi Islam.
- 2) Literatur yang dibutuhkan tersedia di perpustakaan dan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.
- 3) Bidang referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penelitian .

C. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari hasil kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau negara. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas pertumbuhan daerah sehingga mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.

Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk.⁷

Terjadinya pembangunan disuatu negara atau daerah ditandai dengan beberapa aktivitas perekonomian seperti meningkatnya produktivitas dan kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya.

Ada beberapa tiga tujuan pembangunan yaitu :

1. *peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok* seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan.

⁷Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, jilid 1, Edisi Kesebelas, (Jakarta: Erlangga,2009), h.16

2. *Peningkatan standar hidup* yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta keseluruhan hal-hal yang tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*material well-being*) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.
3. *Perluasan pilihan ekonomi dan sosial* yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada orang dan negara-negara lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan.⁸

Pembangunan ekonomi daerah dilaksanakan berdasarkan dengan kemampuan daerah masing-masing dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga dapat mendorong peningkatan keuangan daerah. Meningkatnya keuangan daerah dapat membiayai seluruh pengeluaran daerah untuk memperbaiki sarana publik dalam meningkatkan pelayanan publik.

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan

⁸Michael P. Todaro, *Ibid*, h.27

gambaran tentang keadaan pada masa lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Evaluasi yang telah dilakukan dapat menilai kinerja pemerintahan dalam menjalankan roda perekonomian dalam suatu daerah sehingga dapat terlihat tumbuh kembang perekonomian suatu daerah menuju masa-masa yang akan datang dengan selalu mengevaluasi perkembangan perekonomian ditahun-tahun sebelumnya. Karena, dikatakan berkembang dan daerah tersebut mengalami perkembangan dalam hal perekonomian itu dinyatakan dengan terus meningkatnya pendapatan dan menyalurkan pendapatan sebagaimana sesuai dengan kebutuhan pengeluaran suatu daerah sehingga terjadilah keseimbangan yang selaras.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah.⁹ Pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dibidang ekonomi. Untuk menggambarkan keadaan perekonomian tersebut, diperlukan angka-angka yang diwujudkan dalam suatu indikator. Para perencana, penentu kebijakan dan pembuat keputusan yang berhubungan dengan perekonomian diharapkan dapat menggunakan dan memanfaatkan indikator ekonomi ini. Sehingga arah dan kebijaksanaan

⁹Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (Publikasi) : “*Produk Domestic Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*”, www.bps.go.id/, h. 88

pembangunan dapat dievaluasi, seperti hal-hal yang belum tercapai dan kondisi apa yang harus dipacu dan dikembangkan.

Indikator ekonomi yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia pada periode Agustus 2017. Sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan yang difokuskan pada pencapaian dan pemeliharaan kestabilan nilai rupiah. Indikator ekonomi tersebut antara lain: (1) Inflasi dan PDRB , (2) Sistem Pembayaran dan (3) Perbankan. Ada beberapa komponen-komponen mengenai indikator ekonomi antara lain : (1) Inflasi dan PDRB meliputi Indeks Harga Konsumen, Laju Inflasi, PDRB ADHK, Pertumbuhan PDRB, Nilai Ekspor Non Migas, Volume Ekspor, Nilai Impor, dan Volume Impor. (2) Sistem Pembayaran, membahas mengenai beberapa indikator Makro dan (3) Perbankan, terbagi menjadi dua. Pertama, Bank Umum dan kedua, Bank Perkreditan Rakyat (BPR).¹⁰

Struktur ekonomi wilayah tercermin dari besarnya kontribusi PDRB masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB. Dengan mengetahui struktur ekonomi wilayah, maka upaya pembangunan ekonomi dapat diarahkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi wilayah. Struktur ekonomi juga dapat

¹⁰ Bank Indonesia (Publikasi) : *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Lampung Agustus 2017*, h.2

dijadikan acuan untuk merencanakan upaya perbaikan struktur, maupun penciptaan struktur ekonomi wilayah yang ideal dalam jangka panjang.¹¹

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dilihat dari nilai konstan. Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB, yaitu :

1. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian. Hal ini berarti peningkatan PDRB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
2. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah negara (Perekonomian Domestik)
3. PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah atau tercermin melalui pertumbuhan PDRB.¹²

Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam yaitu; *Pertama*, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan

¹¹ Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2017, BPS Provinsi Lampung, h.12

¹² M. Zaihari MS, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1 No.1 September 2017, h 181

jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian dan *Kedua*, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.¹³

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara dan daerah dapat diukur dengan indikator utama yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Akan tetapi, perubahan PDB/PDRB dari tahun ke tahun tidak hanya disebabkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi tetapi juga oleh adanya kenaikan harga-harga. Oleh karena itu perlu ditentukan perubahan yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun dengan cara menghilangkan pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai PDB/PDRB, sehingga yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah PDB/PDRB menurut Harga Konstan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di peroleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian, perhitungan berdasarkan harga konstan perkembangan riil dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan Penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi riil dapat dihitung. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar

¹³Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (Publikasi), *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016*, h.2

Harga Konstan Tahun 2000 menurut lapangan usaha provinsi Lampung tahun 2005-2017 dijelaskan pada Tabel 1.1 yang terdapat di Lampiran.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB provinsi Lampung dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Angka ini terus mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Lapangan usaha pemberi *share* terbesar kedua adalah Industri Pengolahan, sektor ini mengalami kenaikan selama 13 tahun berturut-turut. Kategori Industri Pengolahan meliputi 16 Industri, yaitu; Industri batubara, Industri makan dan minum, Industri pengolahan tembakau, Industri tekstil, Industri logam, Dll. Lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda memberikan kontribusi terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Provinsi Lampung tahun 2005-2017. Sementara peranan lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan lebih lambat dibandingkan dengan sektor-sektor maupun dengan tahun sebelumnya.

Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi meningkat, sementara perekonomian yang menurun atau pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti turunnya kesejahteraan ekonomi.

Disisi lain tingkat pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian.¹⁴ Berikut disajikan tabel mengenai Pertumbuhan Ekonomi Se-Sumatera dan Indonesia pada tahun 2005-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2005-2017
(Persen).

Provinsi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Indonesia	5,60	5,50	6,35	6,01	4,58	6,10	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,02	5,07
B. Sumatera	5,01	5,26	4,96	4,98	3,50	5,49	6,19	5,75	4,97	4,58	3,53	4,29	4,30
1. Jambi	5,40	5,89	6,28	7,16	6,39	7,31	7,86	7,03	6,84	7,36	4,20	4,37	4,46
2. Kep. Riau	5,32	6,78	7,01	6,63	3,52	7,21	6,96	7,63	7,21	6,60	6,01	5,03	2,01
3. Sumatera Utara	5,48	6,20	6,90	6,39	5,07	6,35	6,66	6,45	6,07	5,23	5,10	5,18	5,12
4. Sumatera Barat	5,02	6,14	6,34	6,88	4,28	5,93	6,34	6,31	6,30	5,65	5,52	5,26	5,29
5. Bengkulu	4,56	5,95	6,46	5,78	6,43	5,14	6,85	6,83	5,07	5,48	5,13	5,30	4,99
6. Lampung	4,02	4,98	5,94	5,35	5,16	5,75	6,56	6,44	5,77	5,08	5,13	5,15	5,17
7. Sumatera Selatan	4,79	5,20	5,84	5,07	4,11	5,43	6,36	6,83	5,31	4,79	4,42	5,03	5,51
8. Riau	4,89	5,15	3,41	5,65	2,97	4,17	5,57	3,76	2,48	2,71	0,22	2,23	2,71
9. Kep. Bangka Belitung	2,73	3,98	4,54	4,60	3,70	5,85	6,90	5,50	5,20	4,67	4,08	4,11	4,51

¹⁴ M. Zaihari MS, *Ibid*, h 181

10. Aceh	1,20	1,56	-2,36	-5,24	-5,51	2,64	3,28	3,85	2,61	1,55	-0,73	3,31	4,19
----------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	-------	------	------

Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2005-2017.
www.lampung.bps.go.id//

Dalam kurun waktu 13 tahun, pertumbuhan ekonomi lampung cenderung menurun di tahun 2008-2009 atau selama 2 periode dan penurunan selama 3 periode pada tahun 2012-2014 . Dari data laju pertumbuhan ekonomi, provinsi Lampung memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,45% lebih rendah dari Negara Indonesia dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,56%, laju pertumbuhan ekonomi se-Sumatera tertinggi pertama dimiliki oleh provinsi Jambi dengan rata-rata 6,64%. Kedua, provinsi Kepulauan Riau rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 6,32%. Ketiga, yaitu provinsi Sumatera Utara rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,92% dan laju pertumbuhan ekonomi terendah se-Sumatera yaitu provinsi Aceh dengan rata-rata 2,82%. Angka-angka pertumbuhan yang telah tercapai tersebut harus menjadikan pemerintah lebih giat lagi dalam mengelola keuangan dan mengalokasikan pengeluaran kedalam kegiatan ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap daerah kabupaten atau kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah tersebut. Pemerintahan di setiap daerah pun berlomba-lomba dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk strategi dalam meningkatkan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengalokasikan dana tersebut kedalam kegiatan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam membangun perekonomian suatu daerah karena dana ini adalah milik pemerintah daerah itu sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengelola dana tersebut untuk kepentingan pembangunan. Pemerintah daerah pun memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dimana dana tersebut diperoleh dari masyarakat maka masyarakat berhak mendapatkan kelayakan dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di daerah tersebut.

Berikut disajikan data Laporan Realisasi dan Pertumbuhan Tingkat Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.

Data Laporan Realisasi dan Pertumbuhan Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 (Ribuan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan
2005	Rp. 549.657.848	15%
2006	Rp. 631.981.956	
2007	Rp. 674.693.662	7%
2008	Rp. 891.781.561	32%
2009	Rp. 860.357.826	-4%
2010	Rp. 1.118.340.908	30%
2011	Rp. 1.395.675.720	25%
2012	Rp. 1.687.701.199	21%
2013	Rp. 1.771.287.932	5%
2014	Rp. 2.274.685.553	28%
2015	Rp. 2.247.342.668	-1%
2016	Rp. 2.368.796.249	5%

2017	Rp. 2.750.582.686	18%
------	--------------------------	-----

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2005-2017
www.lampung.bps.go.id//

Pada Data Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pemerintah provinsi Lampung mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2008 dengan 32% dari tahun sebelumnya dan pertumbuhan terendah terjadi di tahun -4% pada 2009 dari tahun sebelumnya yang mengartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar Rp. 891.781.561 menjadi sebesar Rp. 860.357.826 dan penurunan juga terjadi pada tahun 2015 dari tahun sebelumnya sehingga hanya mengalami kenaikan sebesar -1% namun dalam penurunan di tahun 2009 dan 2015 tidak terlalu signifikan.

Peranan Pendapatan Asli daerah didalam penerimaan pemerintah daerah sangat diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung suatu proses pembangunan. Pendapatan Asli Daerah sendiri merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi daerah dan lain-lain, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang akhirnya akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah.¹⁵

Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung yang paling besar adalah dari pajak dan retribusi daerah. Sedangkan pajak dihimpun dari seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. Apabila ada kenaikan dalam pertumbuhan

¹⁵ Faisal Fadhly, *Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah?*, JIEP Vol. 16, No. 2, November 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
h. 63

ekonomi di provinsi Lampung akan menyebabkan kenaikan pembayaran pajak. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak tumbuhnya nilai PDRB di provinsi Lampung. PDRB yang terus tumbuh memiliki arti semakin berkembangnya perekonomian di provinsi Lampung. Ketika perekonomian tumbuh akan membawa dampak tumbuhnya pajak yang dihimpun akibat tumbuhnya nilai PDRB. Berdasarkan penjelasan tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang kebenaran bahwa Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung melalui PDRB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam perkembangan suatu daerah bukan hanya Pendapatan Asli Daerah saja yang perlu diperhatikan namun pengeluaran pemerintahan atau dengan kata lain belanja pemerintah pun perlu dikaji dan diperhatikan pada setiap anggaran-anggaran APBD yang dikeluarkan pemerintah untuk keberlangsungan perekonomian atau pembangunan daerah. Dimana salah satu fungsi utama anggaran pemerintah daerah adalah sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Anggaran belanja pemerintah daerah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang diharapkan mampu menciptakan sarana dan prasarana pembangunan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut disajikan data Laporan Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 pada Tabel 1.3 dan Tabel 4.12.

Tabel 1.3.
Data Laporan Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung
Tahun 2005-2017 (Ribuan Rupiah)

Tahun	Pengeluarann Pemda Provinsi Lampung
2005	Rp. 865.266.187
2006	Rp. 1.294.948.833
2007	Rp. 1.532.401.692
2008	Rp. 1.711.015.164
2009	Rp. 1.847.107.847
2010	Rp. 2.004.899.187
2011	Rp. 2.566.078.842
2012	Rp. 3.835.996.351
2013	Rp. 3.884.534.950
2014	Rp. 4.454.187.317
2015	Rp. 4.781.202.048
2016	Rp. 5.476.921.593
2017	Rp. 5.497.354.014

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2005-2017.
www.lampung.bps.go.id//

Dilihat dari Pengeluaran Pemerintah atau alokasi dana untuk pembelanjaan pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah daerah provinsi Lampung tahun 2005-2016 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dan kenaikan dalam memenuhi kebutuhan belanja secara langsung maupun tidak langsung yang sangat signifikan terjadi di tahun 2015-2016 dimana pada tahun 2016 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung mencapai Rp. 5.476.921.593 dari

tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 4.781.202.048 dengan ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 695.719.545. Dari seluruh pengeluaran pemerintah dalam mengalokasikan dananya kedalam kegiatan ekonomi diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung.

Pengeluaran pemerintah biasanya mencerminkan kebijakan pemerintah dalam penentuan anggarannya. Pengeluaran pemerintah terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktifitas pemerintah dalam perekonomian yang antara lain disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan dalam perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan demografi, dan perubahan kegiatan sektor swasta.¹⁶ Dengan demikian pemerintah harus dapat memainkan perannya dalam mengatur tingkat alokasi penggunaan sumber-sumber daya serta distribusi pendapatan diantara konsumen sehingga dapat mempertahankan kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas harga serta laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sodik (2007) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah yang proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah menjadi subjek penting untuk dianalisis. Secara umum gambaran pengeluaran publik yaitu, infrastruktur fisik atau *human capital* dapat mempertinggi pertumbuhan tetapi pengeluaran dapat pula memperlambat

¹⁶ Merry Anitasari, Ahmad soleh, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Bengkulu, h.122

pertumbuhan perekonomian suatu daerah.¹⁷ Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja karena variabel ini diwujudkan pembangunan prasarana ekonomi dan sosial. Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya belanja langsung dan tidak langsung.¹⁸

Mengingat kondisi dan potensi yang berbeda-beda antara masing-masing daerah membawa konsekuensi adanya perbedaan kemampuan dalam menggerakkan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik sehingga dapat menimbulkan berbagai persoalan, terutama menyangkut masalah pengelolaan sumber-sumber potensi daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengeluaran pemerintah daerah yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah provinsi Lampung.

Pandangan ekonomi Islam dalam pendekatan makro ekonomi mengenai pertumbuhan dan pembangunan dalam sebuah negara ataupun daerah sesuai dengan kemampuan, potensi dan sistem yang diberlakukan di negara atau daerah tersebut. Peran manusia dalam mencapai kesejahteraan di dunia diantaranya diatur melalui dinamika perekonomian. Oleh karenanya manusia tidak akan lepas

¹⁷ J, Sodik, *Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia*. Vol. 12 No.1. Economic Journal of Emerging Markets. 2007, h. 109

¹⁸ M, Zahari MS, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi*, Vol.1 No.1 September 2017, h. 183

dari dinamika ekonomi yang melingkupi segala aspek kehidupan. Al-Qur'an telah mengisyaratkan pentingnya andil dalam bidang perekonomian.

Firman Allah SWT :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *“Apabila telah ditunaikan shalat. Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”* (QS. Al-Jum'ah : 10)

Allah memerintahkan umat muslim untuk bertebaran di muka bumi sebagai upaya mendapatkan rizki yang halal, sesudah melaksanakan apa yang bermanfaat untuk akhiratnya. Dalam berusaha, umat muslim hendaknya mengingat Allah sebanyak-banyaknya serta menghindari dari transaksi yang curang, menyeleweng, dan perbuatan dosa lainnya.¹⁹ Demikian Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk bersikap seimbang antara kepentingan yang berorientasi duniawi maupun ukhrawi. Kedua dimensi ini tidak bisa dipisahkan, hubungan hamba dengan tuhan serta kepentingan pribadinya haruslah seimbang.

Prinsip-prinsip ekonomi yang dikonsepsikan Al-Qur'an selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sasaran nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NKRI 1945. Hal yang ingin dituju dari sistem ekonomi kerakyatan adalah pengentasan kehidupan rakyat dari

¹⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 12, h. 136

kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, rasa was-was menatap masa depan, perlakuan tidak adil, maupun kerusakan lingkungan hidup.²⁰

Allah SWT memberikan batasan-batasan dalam penggunaan harta sebagai hajat ekonomi selain untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia, sehingga tidak akan merugikan siapapun dalam hal ini sebagai prioritas utamanya adalah ketaatan manusia kepada Tuhan, yakni Allah SWT, karena hakikatnya pemilik harta dan seisi bumi bukanlah manusia melainkan diri-Nya.

Ekonomi Islam adalah suatu rancangan dasar sistem pengelolaan sumber daya yang mempunyai nilai. Sumber daya tersebut baik materi maupun non materi sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan hidup dengan batasan-batasan tertentu. Maka objek ekonomi sebagaimana dikenal luas yakni harta. Dalam ekonomi Islam pemberdayaan harta sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari sumber ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai tuntunannya.

Tokoh ekonomi Umer Chapra (1981) berpendapat bahwa Ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka sesuai dengan *Maqashid* , tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan,

²⁰Soeharsono Sagir dkk, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Kencan Permada Media Group,2009), h.2

membentuk solidaritas keluarga, social dan jaringan moral masyarakat.²¹ Apa yang dikemukakan Umer Chapra ini menunjukkan bahwa adanya batasan dari kebebasan manusia yang cenderung ingin merealisasikan kemauan nafsunya. Ini adalah pembeda dari ekonomi konvensional yang cenderung tidak mempertimbangkan aspek keseimbangan yang terhubung antara terpenuhinya kebutuhan manusia dan keseimbangan dunia serta akhirat.

Dalam makro ekonomi Islam keuangan publik diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara Muslim. Inilah tugas pemerintah dalam negara/daerah Muslim untuk menggunakan keuangan tersebut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan ketaqwaan masyarakat. Jadi, sebagian besar anggaran pemerintah akan digunakan pada aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim.

Kegiatan yang menambah pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu pada kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Berbeda dengan kitab-kitab agama lain, Kitab Suci Al-Qur'an telah menetapkan perintah-perintah yang sangat tepat mengenai kebijakan negara tentang pengeluaran dan pendapatan negara. Zakat (yaitu pajak yang diberikan kaum Muslimin) dimaksudkan untuk kaum miskin (*fukara*) Muslimin, golongan miskin dikalangan orang asing yang menetap (*masakin*), untuk merebut hati mereka, membebaskan budak dan tawanan perang, membantu mereka yang terjerat utang, mereka yang dijalan Allah, dan untuk para

²¹Sumar'in, *Op.Cit*, h.11

*musyafir*²². Ini merupakan kewajiban yang ditentukan Allah dan Allah Maha Mengetahui.

Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah : 219, "*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : 'Yang lebih dari keperluan'*". Ini bukanlah berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak menentu, namun untuk kemaslahatan. Islam bukan hanya mencegah tapi mengutuk pemborosan. Dalam Al-Qur'an dinyatakan : "*Dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (Q.S.Al-Araf : 31) penimbangan juga dikutuk karena dengan kekayaan yang tak dapat beredar dan manfaat penggunaannya tidak dapat dinikmati si pemakai ataupun masyarakat. Di samping itu, membagi-bagi harta benda dalam hukum waris Islam.

Berdasarkan sumber-sumber penerimaan anggaran tersebut maka dapat disalurkan untuk pembelanjaan negara/daerah yang kesemuanya ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Distribusi sumber pendapatan *Zakat* dikeluarkan untuk kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap muslim yang mempunyai harta benda yang telah mempunyai *Nishab* wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak.²³ *Zakat* merupakan salah satu kebijakan publik yang diterapkan dalam Islam. Selain itu,

²²Eko Supriyanto, *EKONOMI ISLAM (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 183

²³ Eko Supriyanto, *Ibid* , h.174

zakat juga merupakan bentuk distribusi yang paling efektif dalam menciptakan stabilitas dan pemerataan ekonomi.²⁴

Sedangkan berdasarkan kebijakan pengeluaran pemerintah dalam pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi suatu daerah, dalam ajaran Islam hal tersebut dipandu oleh kaidah-kaidah yang didasarkan Al-Qurán dan As-Sunnah. Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 3, antara lain:

1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.²⁵

D. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini maka peneliti membatasi masalahnya dimana Data diperoleh yaitu dari publikasi BPS (Badan Pusat Statistik) provinsi Lampung. Penelitian dilakukan secara *Time Series* atau berturut-turut selama 13 tahun (2005-2017)

²⁴ Sumar'in, *Ibid*, h.69

²⁵ Eko Supriyanto, *Ibid*, h.169

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017?
4. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam?

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2005-2017.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2005-2017.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2005-2017.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 berdasarkan perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis. Khususnya digunakan sebagai solusi alternatif untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung selama periode tahun 2005-2017.

b. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini untuk mengembangkan keilmuan penulis untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan study di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Sedangkan bagi pemerintah daerah Provinsi Lampung, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bagian pertimbangan dan pedoman dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.²⁶

Pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kuznets adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.²⁷

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi disetiap negara. Setiap negara akan berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang paling optimal. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan membawa manfaat bagi masyarakat luas.²⁸

²⁶ Rahardjo Adisasmita, *Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*: Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.1

²⁷ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2002, h. 44

²⁸ Rahardjo Adisasmita, *Ibid*, h.55

Pada teori Klasik, ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang banyak dikemukakan oleh beberapa ekonom diantaranya adalah *Mazhab Klasik*. Teori ini pertama kali dilontarkan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry The Nature and Causes of the Wealth of Nation* dan *The Wealth of Nations*. Menurut *Mazhab Klasik*, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor;

- a. Jumlah Penduduk
- b. Jumlah stok barang-barang modal
- c. Luas tanas dan kekayaan alam
- d. Penggunaan teknologi.²⁹

Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith, sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisien membawa ekonomi kepada kondisi *Full employment*, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner.³⁰ Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi, pembagian tenaga kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori ini, dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.

²⁹ Zaenu Zuhdi, *Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Malang DPK di STAI Ma'had Ali Al-Hikam, h.3

³⁰ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Edisi Revisi* (Jakarta:PT.Bumi Aksara, 2014), h.47

Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara/wilayah, proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan karakteristik satu sama lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar.³¹

Dari berbagai teori pertumbuhan yang lainnya yakni teori Harold Domar, Neoklasik dari Solow, dan teori Endogen dari Romer, bahwasanya terdapat 3 faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi.³² Ketiganya adalah : (1) Akumulasi Modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia, (2) Pertumbuhan Penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, (3) Kemajuan Teknologi.

Teori Solow-swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri/mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dalam modal neo-klasik Solow-swan sangat memperhatikan faktor kemajuan teknik, yang dapat

³¹ Akron Hasani, *Analisis Periode Struktur Perekonomian Berdasarkan Pendekatan Shift Share di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2003-2008*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), h. 27

³² Todaro *Op.Cit*, h.92

ditempu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), mutu SDM adalah menyangkut keahlian dan moral. Oleh sebab itu, pemerintahan perlu mendorong terciptanya kreativitas dalam kehidupan masyarakat agar produktivitas per tenaga kerja terus meningkat.³³

3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu Negara/wilayah diukur berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi selama periode tertentu.³⁴

Perubahan PDB/PDRB dari tahun ke tahun tidak hanya disebabkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi tetapi juga oleh adanya kenaikan harga-harga. Oleh karena itu perlu ditentukan perubahan yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun dengan cara menghilangkan pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai PDB/PDRB, sehingga yang

³³ Robinson Tarigan, *Op Cit*, h.54

³⁴ M, Zahari MS, *Ibid*, h.186

digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah PDB/PDRB menurut Harga Konstan. Dengan demikian, perhitungan berdasarkan harga konstan perkembangan rill dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan Penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi rill dapat dihitung.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diketahui dengan membandingkan PDRB Rill pada satu tahun tertentu (PDRB_t) dengan PDRB tahun sebelumnya (PDRB_{t-1}).³⁵

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

4. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi.³⁶

Perbedaan yang paling utama antara konsep pertumbuhan dalam Islam dan Konvensional adalah terletak pada asas yang dipakai, dalam Islam unsur spiritualis (agama) menjadi prioritas utama. Arti agama disini adalah ajaran agama yang termanifestasi dalam Al-Qurán dan sunnah Rasul.

Adapun asas-asas pertumbuhan dalam Islam ada empat, yaitu;

³⁵ *Ibid*

³⁶ Almizan, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Imam Bonjol Padang, Jurnal Kajian Ekonomi Islam- Vol.1 No.2 Juli-Desember 2016, h.207

1. *Tauhid*

Konsep *Tauhid* adalah menjalankan hubungan sesama manusia dengan Allah SWT. Manusia harus patuh pada Allah SWT, kepatuhan manusia kepada Allah SWT dilihat dari tingkah laku dan tindakan mereka mematuhi perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-Nya dengan cara ikhlas dan menyeluruh.

2. *Rububiyah*

Konsep yang menerangkan sikap Allah SWT. Sifat Allah SWT adalah sebagai penguasa di alam ini. Dia yang berkuasa membuat peraturan untuk menjamin dan membimbing kehidupan manusia supaya sejahtera. Dia juga berkuasa untuk menjaga, mengawasi, menampung dan mengurus kehidupan makhluk kearah kesempurnaan.

3. *Khilafah*

Manusia sebagai utusan Allah SWT dimuka bumi. Tanggung jawab utamanya ialah sebagai pemegang amanah Allah SWT dalam segala aspek seperti akhlak, ekonomi, politik dan sosial. Sebagai pemegang amanah, manusia tidak boleh merusak alam ini. Pembangunan yang hendak dijalankan adalah memberi kebaikan seperti yang diajarkan oleh Allah SWT melalui Nabi-Nya. Oleh karena itu, manusia wajib menghindari dari melakukan pembangunan yang dapat merusak, yaitu pembangunan membawa kepada keruntuhan, kekacauan dan kedzaliman/tidak adil.

Landasan adanya tanggung jawab sebagai salah satu fondasi paling penting diungkapkan secara jelas dalam syariat Islam, dimana tanggung jawab memiliki dua sisi yang *pertama* tanggung jawab antara sebagian anggota masyarakat dan sebagian golongan lainnya, *kedua* tanggung jawab Negara terhadap masyarakat.³⁷

4. *Tazkiyah*

Tazkiyah merupakan mekanisme utama bagi mewujudkan pertumbuhan termasuk sumber daya manusia. *Tazkiyah* melibatkan proses penyucian dinamik yang perlu dilakukan oleh setiap umat manusia sekiranya dia mempunyai keinginan untuk maju dan sejahtera.

Keempat asas tersebut merupakan pijakan utama yang mempunyai nilai etika bagi manusia dalam melakukan pembangunan dimuka bumi, karena keempat asas tersebut sudah mencakup aspek kehidupan manusia baik materi atau spiritualitas sebagai cirri khusus ekonomi yang berlandaskan ajaran syariah.³⁸

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis,

³⁷ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta:Kencana),2012, h.127

³⁸ Zaenu Zuhdi, *Ibid.* h.9-10

dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan.³⁹

Dijelaskan dalam firman Allah SWT QS Al-A'raff 96 :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا

كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: *“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”*.⁴⁰

Dalam uraian ayat tersebut Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada hambanya jika kita sebagai umatnya senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan, keimanan serta selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada umatnya seperti sumber daya alam yang sangat melimpah disuatu negeri.

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi tersebut diharapkan pemerintah mampu mengelola dan mendistribusikan sumber daya alam ekonomi yang ada secara adil dan merata sehingga

³⁹ Elis Susanti, *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2015 Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Raden Intan Lampung, 2017 h.124

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet. Ke-10*, Jakarta: Darus Sunnah, 2011

pertumbuhan ekonomi pun tumbuh secara baik sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan demi kemaslahatan masyarakat itu sendiri.

B. Konsep Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dapat digunakan dalam proses pembangunan daerah.⁴²

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan atau pemasukkan rutin daerah yang didapatkan dari memanfaatkan potensi-potensi ekonomi dalam wilayah itu sendiri dan diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi; Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan BUMD dan Pendapatan asli daerah lainnya yang sah (seperti: hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro)⁴³.

⁴¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* edisi revisi, (Jakarta: PT.Grafindo Persada,2013), h.14

⁴² Marihot Pahala Siahaan, *Ibid*, h.13-14

⁴³ Rahardjo Adisasmita, *Ibid* , h. 143

Semua sumber-sumber tersebut didapat dari memanfaatkan dan mengelola potensi wilayah tersebut.

a. Pajak Daerah

Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman. Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah ini dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pendapatan pajak daerah ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah antara lain; pajak

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.⁴⁴

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Ahmad Yani adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴⁵

Pengertian Retribusi daerah menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pengguna jasa atau fasilitas.⁴⁶

Dari beberapa pengertian tentang Retribusi daerah maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa, fasilitas dan/atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat atau badan.

Retribusi Daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan,

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (publikasi), *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012- 2016*, h.6

⁴⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) , h.63

⁴⁶ BPS Provinsi Lampung , *Ibid*, h.5

penjualan produksi daerah, izin peruntukkan penggunaan tanah, izin trayek, dan lain-lain.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan terpisah dari pengelolaan APBD. Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dihasilkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mencakup yaitu ; Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat.⁴⁷

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklarifikasikan baik kedalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan/atau

⁴⁷ Anggun Tri Wahyuni, “Pengaruh PDRB, Tingkat Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kota Bandar Lampung pada tahun 2006-2015)” Skripsi , h.45.

memantapkan suatu kebijakan daerah dibidang tertentu yang meliputi pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, tuntutan ganti rugi, penerimaan lain-lain, hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan dan pendapatan pajak denda.⁴⁸

3. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Islam sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap mampu memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkannya syari'at islam, yaitu untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat maka pemerintah daerah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.⁴⁹

Nurlela menjelaskan pendapatan terbagi menjadi dua bagian yaitu Pendapatan Utama (primer) yang terdiri dari *Ghanimah* dan *Faí*, dan Pendapatan Sekunder yang diperoleh secara tidak tetap terdiri atas *Ghulul*, *Kaffarat*, *Luqathah*, Waqaf, Uang Tebusan, *Khums/Rikaz*, Pinjaman, *Amwal Fadhla*, *Nawaib*, hadiah dan lain-lain.⁵⁰

⁴⁸ BPS Provisini Lampung , *Ibid*, h.6

⁴⁹ Anggun Tri Wahyuni, *Ibid*, h.46

⁵⁰ Nurlela, "Pengaruh Optimalisasi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kab. OKU Selatan tahun 2006-2017)" h. 47

Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah dalam Islam adalah sebagai bentuk keuangan publik yang digunakan untuk pembiayaan dan pengeluaran daerah demi kesejahteraan yang diatur oleh pemerintah. Kebijakan fiskal dalam Islam yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan.

Pada masa Islam, pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara, adapun sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut :

a. Zakat.

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Sesuai dengan perintah Allah dalam QS At-Taubah (9): 103 ;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah lagi Maha Mendengar dan Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah 9:103)

Dalam praktek zakat, terjadi perpindahan harta dari Muzakki pada Mustahik sehingga para Mustahik akan mampu meningkatkan konsumsi dan produktivitas kerja dan tentunya akan mampu menumbuhkan perekonomian.

Periode Mekkah *Zakat* diisyaratkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah, pungutan pajak menjadi wajib dan diambil oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut.⁵¹

b. *Kharraj*.

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah SAW adalah *Kharraj*. *Kharraj* adalah pajak terhadap tanah atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar pada sistem PBB dengan sistem *Kharraj* adalah bahwa *Kharraj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (*Land Productivity*) bukan berdasarkan Zoning.⁵²

Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya disatu sisi ditanami oleh tanaman anggur dan disatu

⁵¹ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta:Kencana),2012, h.25-26

⁵² Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.264

sisi lainnya ditanami oleh tanaman kurma, maka mereka harus membayar jumlah *Kharraj* yang berbeda .

c. *Khums*.

Para ulama *Syi'I* mengatakan bahwa sumber pendapatannya apapun harus dikenakan *Khums* sebesar 20%, sedangkan ulama *Sunni* beranggapan bahwa *Khums* hanya berlaku pada harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid dalam *Adi* menyatakan bahwa yang dimaksud *Khums* ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.⁵³

d. *Ghanimah dan Fa'I*.

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut *Ghonimah*, jika pergantian pemerintahan tidak dengan peperangan tetapi mungkin dengan kudeta atau memenangkan pemilu, penyerahan secara damai negara jajahan dan cara-cara lain maka tanah Negara dan harta benda lainnya disebut *Fa'i*.⁵⁴

e. *Jizyah*.

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara

⁵³ Adiwarmarman Karim , *Ibid*, h.264

⁵⁴ Nurul Huda, et.al., *Op.Cit*, h.30

Islam. *Jizyah* sama dengan *Pull Tax* , karena orang-orang non-muslim tidak mengenal *zakat fitrah*.

f. Pendapatan Lainnya.

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut dengan *Khaffarah*, yaitu denda. Misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan disiang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk kedalam pendapatan Negara.⁵⁵

C. Konsep Pengeluaran Pemerintah.

1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah atau daerah diperoleh dari seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima dari daerahnya sendiri dan segala pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kegiatan daerah salah satunya kegiatan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno, Pengeluaran Pemerintah adalah pembelanjaan pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa.⁵⁶

Dalam pengeluaran pemerintah disebut sebagai belanja daerah. Kebijakan umum Belanja Daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan

⁵⁵ Adiwarman Karim, *Op.Cit*, h.266

⁵⁶ Sadono Sukirno, Makroekonomi. *Teori Pengantar*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada), 2010, h.192

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota.⁵⁷

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

2. Struktur Belanja Daerah

Sesuai dengan Permendagri tersebut telah ditentukan bahwa struktur belanja daerah terdiri 2 bagian, yaitu:

a. Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terikat langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung diantaranya:⁵⁸

- 1) belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (Publikasi), *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012-2016*, h.8

⁵⁸ Badan Pusat Statistik, *Ibid*, h.8

kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*Principal Outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

3) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar hasil jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk barang/jasa pelayanan umum masyarakat.

4) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

5) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial tidak diberikan secara terus-

menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.

6) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

8) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta modal belanja. Belanja yang bersifat strategis, dengan nilai yang besar, dapat dilaksanakan dengan menetapkan belanja *Multi Years* dan/atau *Turn Key* yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD. Belanja langsung meliputi beberapa belanja daerah , diantaranya:⁵⁹

- 1) Belanja Pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran Honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- 3) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat yang lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah.

⁵⁹ Badan Pusat Statistik, *Ibid* , h.10

3. Teori Dasar Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda yang berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional.⁶⁰

Kajian teori ekonomi makro dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Teori Wagner dan Pengikutnya

Dari persamaan empiris yang dilakukan oleh Adolph Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke 19 menunjukkan bahwa aktifitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat (*law of ever increasing state activity*). Menurut Wagner dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relative pengeluaran pun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:⁶¹

$$\frac{GpCt}{YpCt} > \frac{GPct-1}{YpCt-1} > \frac{GPct-2}{YpCt-2} \rightarrow \frac{GpCt-n}{YpCt-n}$$

⁶⁰Manik, Rikwan dan Hidayat, Paidi. *Analisis Kasualitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara*. Jurnal keuangan dan bisnis, Vol 2 No.1, hlm 9

⁶¹Tria Dessi Putri, Toto Gunarto, Saimul, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perkembangan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000-2013" h.8

Dimana :

Gpc : Pengeluaran pemerintah Per kapita

Ypc : Pendapatan nasional Per kapita

t : Indeks Waktu

Disamping itu menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu : (1) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, (2) Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, (3) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, (4) perkembangan demokrasi dan (5) ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.

Menurut Wagner pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri, industri masyarakat dan sebagainya akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan pasar eksternalisasi negatif menjadi semakin besar.

Kelemahan hukum Wagner adalah hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang publik, tetapi Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of state*) yang menganggap pemerintah

sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.⁶²

b. Teori Keynes

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y=C+I+G+(X-M)$ merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keyensian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional.⁶³

Pada dasarnya ada 3 faktor yang akan menentukan pengeluaran pemerintah pada suatu tahun tertentu, yaitu : (1) pajak yang diharapkan akan diterima, (2) pertimbangan-pertimbangan politik dan (3) persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi .

⁶² Mahyuni, “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Periode 2000-2010*”. (Skripsi Ilmu Ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Makasar, Februari 2013).

⁶³ M. Zahari MS, “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi*”. (Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis) Vol. 1 No.1 September 2017. h. 187

c. Teori Rostow dan Musgrave

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada awal tahap perkembangan ekonomi presentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.⁶⁴

4. Pengeluaran Pemerintah dalam Pandangan Ekonomi Islam.

Negara sesungguhnya sangat berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Apabila ada rakyat yang menganggur atau miskin terlunta-lunta tanpa keluarga, maka Negara wajib membantu dan menyelamatkan mereka dengan pengeluaran pemerintah baik dalam bentuk pemberdayaan maupun

⁶⁴ Merri Anitasari, Ahmad Soleh. *“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu”* h.120

dalam bentuk santunan.⁶⁵ Demikian apabila rakyat memerlukan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ekonomi maka Negara wajib untuk mengadakannya. Karena itulah Negara membutuhkan dana atau pembiayaan yang cukup untuk tujuan kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan rakyat pada umumnya. Dalam Islam kebijakan dalam pemungutan dana untuk membiayai kebutuhan ekonomi dan sosial yaitu dengan Zakat, sedekah, Khum, Kharaj, Fa'ī dan pendapatan lainnya.

Pelaksanaan *zakat* pada zaman Rasulullah SAW sebagai pembiayaan publik dan yang kemudian diteruskan para sahabatnya, yaitu para petugas mengambil *zakat* dari para *muzzaki*, atau *muzzaki* sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada Baitumal, lalu oleh para petugasnya (amil zakat) didistribusikan kepada para mustahik. Pada masa Rasulullah SAW, masalah pengelolaan zakat, walaupun dalam bentuk yang sederhana namun pengelolaan zakat pada masa itu dapat dinilai berhasil.

Kegiatan yang menambah pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu pada kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Berbeda dengan kitab-kitab agama lain, Kitab Suci Al-Qur'an telah menetapkan perintah-perintah yang sangat tepat mengenai kebijakan negara tentang pengeluaran dan pendapatan negara. Zakat (yaitu pajak yang diberikan kaum Muslimin) dimaksudkan untuk kaum miskin (*fukara*) Muslimin, golongan miskin dikalangan orang

⁶⁵ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, h. 66

asing yang menetap (*masakin*), untuk merebut hati mereka, membebaskan budak dan tawanan perang, membantu mereka yang terjerat utang, mereka yang dijalan Allah, dan untuk para musyafir⁶⁶. Ini merupakan kewajiban yang ditentukan Allah dan Allah Maha Mengetahui.

Kepentingan pertama diarahkan pada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara. Kemudian kepentingan kedua dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain, menurut Ibn Taimiyah, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengeluaran untuk para gubernur, menteri dan pejabat pemerintah lain tak dapat dielakkan oleh pemerintah maupun, harus dibiayai dari anggaran penerimaan fai’.
- b. Memelihara keadilan. Negara harus mengurus hakim atau qadi.
- c. Biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya.
- d. Utilitas umum, infrastruktur dan gugus tugas ekonomi, harus ditanggung negara.⁶⁷

Terangkum dengan jelas bahwa sistem perekonomian yang mengenai anggaran belanja menjadi suatu perbedaan yang mendasar mengenai sistem anggaran belanja pada masa Islam dan Modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan umat, yang telah ditetapkan sesuai dengan Al-Qurán dan Hadits yang menjadi pandangan agama Islam. Selain itu kebijakan pengeluaran juga digunakan untuk pertahanan Negara dan

⁶⁶Eko Supriyanto, *EKONOMI ISLAM (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 183

⁶⁷Eko Supriyanto, *Ibid*, h.184

menjaga perdamaian Negara serta pembiayaan proyek dalam pembangunan fasilitas sarana dan prasarana untuk mensejahterakan masyarakat.

D. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).⁶⁸

Selanjutnya menurut Tarigan pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*Gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu.⁶⁹

Dari beberapa pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai tambah bruto yang didapat dari segala kegiatan perekonomian suatu wilayah tertentu.

Salah satu cara untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (Publikasi), *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016* h. 2

⁶⁹ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 2005, h.18

berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

a. Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu:⁷⁰

1) Pendekatan Produksi

Pendekatan Produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sector ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari total nilai produksi bruto sector atau subsector tersebut. Pendekatan ini sering digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sector/kegiatan yang produksinya berbentuk fisik/barang, seperti pertanian, pertambangan dan industri sebagainya.

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (Publikasi), *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016* h. 2

2) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi didalam negeri.⁷¹ Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (Investasi), perubahan stok, dan ekspor neto dimana nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik.

3) Pendekatan Pendapatan.

Pendekatan Pendapatan merupakan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dari keuntungan tidak diperhitungkan.

Dengan demikian apabila pengukuran PDRB apat dilakukan melalui 3 (Tiga) pendekatan, maka secara langsung akan ditunjukkan adanya keterkaitan antara nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dengan pendapatan yang diterima, serta bagaimana berbagai

⁷¹ Robinso tarigan, *Op.Cit*, h.24

institusi (rumah tangga, swasta dan pemerintah) menggunakan pendapatannya untuk membiayai pengeluarannya.⁷²

2. Hubungan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi. PDRB adalah dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah/wilayah.

Hubunga antara PDRB dengan pajak daerah merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari Pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonmi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.⁷³

Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung yang paling besar adalah dari pajak dan retribusi daerah. Sedangkan pajak dihimpun dari seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. Apabila ada kenaikan dalam pertumbuhan

⁷² BPS Jakarta-Indonesia, *Pedoman Praktis Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota*, CV. Chandar Abadi, h.19

⁷³ Faisal Fadly, *Ibid*, h.67

ekonomi di provinsi Lampung akan menyebabkan kenaikan pembayaran pajak. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak tumbuhnya nilai PDRB di provinsi Lampung. PDRB yang terus tumbuh memiliki arti semakin berkembangnya perekonomian di provinsi Lampung. Ketika perekonomian tumbuh akan membawa dampak tumbuhnya pajak yang dihimpun akibat tumbuhnya nilai PDRB. Dari data tersebut mampu menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengolah sumber daya alam dan manusia yang dimiliki. Kegiatan ekonomi yang meningkat dapat memacu jenis-jenis usaha untuk membayar pajak yang selanjutnya akan menjadi pemasukan/Pendapatan Asli Daerah.

3. Hubungan PDRB Terhadap Pengeluaran Pemerintah

Dalam Teori Wagner, mengemukakan teorinya dalam suatu hukum yaitu, dimana dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Dalam kebijakan fiskal ada beberapa kebijakan anggaran, salah satunya yaitu anggaran defisit yaitu anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Kebijakan ini digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.⁷⁴

Dalam instrument belanja pemerintah dalam pengeluaran pemerintah terdapat alokasi belanja modal yang disebut sebagai komponen belanja

⁷⁴ Merry AnitaSari, Ahmad Soleh. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Review, h.199-120

pembangunan pada pengeluaran daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang kemudian akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai absolute Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai relative perubahan PDRB yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.⁷⁵

Pengeluaran Pemerintah berupa pengeluaran pembangunan dan pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di jenis-jenis unit usaha dalam PDRB, sehingga penerimaan pajak pun akan naik. Kenaikan dari Pendapatan Asli Daerah akan dikelola kembali oleh pemerintah dalam hal pembangunan dan pelayanan publik.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pandangan Islam mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggunakan parameter *Falah*. *Falah* adalah kesejahteraan yang sebenarnya. Dimana komponen rohaniah masuk kedalam pengertian *Falah*, maka dari itu selain harus memasukkan unsure *falah* dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional GDP riil berdasarkan Islam

⁷⁵ Rudi Bahrudin, *Ekonomina Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2012, h.20

juga harus mampu mengenali interaksi instrument-instrumen wakaf, zakat dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁶

Dalam ekonomi Islam PDRB/PDB secara fungsional akan mempengaruhi penerimaan pajak dengan meningkatnya pendapatan pajak dalam bentuk wakaf, zakat dan sedekah dan pendapatan lainnya akan memberikan dampak yang baik dikarenakan meningkatnya suatu penerimaan Negara maka makin optimal pengeluaran Negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut variabel-variabel yang ada, untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembandingan dalam penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan Muhammad Nur Afiat pada tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara” penelitian ini terdiri dari dua variabel dimana satu variabel independen dan satu variabel dependen. Pada penelitian ini variabel struktur ekonomi diukur dengan indikator sektor industri. Hasil dari penelitian ini

⁷⁶ Anggun Tri Wahyuni, *Ibid*, h.57

menunjukkan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perubahan struktur ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan sektor industri di Provinsi Sulawesi Tenggara.⁷⁷

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Cherrya Dhia Wenny dengan jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.” Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan namun secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.⁷⁸

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Endang Rahayu dengan jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara”. Penelitian ini memiliki tiga variabel

⁷⁷ Muhammad Nur Afiat, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara” Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol XVI tahun 8, Desember 2015.

⁷⁸ Cherrya Dhia Wenny, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”, Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol. 2 No. 1 September 2012.

yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa variabel X1 yaitu Pengeluaran Pemerintah (aparatur daerah) mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dan variabel X2 yaitu Pelayanan Publik mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.⁷⁹

Selanjutnya yaitu penelitian dari Armiadi Musa dengan jurnal yang berjudul “Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh”. Hasil dari penelitian ini *Pertama*, Baitul mal mengalami kesulitan dalam pengelolaan pajak terutama dalam proses pengumpulan dan pengeluaran dari Dinas Keuangan Aceh. *Kedua*, dalam mekanisme APBD/APBA, jumlah penerimaan dan pengeluaran anggaran diatur relative ketat. *Ketiga*, masih terjadinya kekaburan dalam hal tanggung jawab pengelolaan zakat antara badan pelaksana sebagai lembaga independen resmi dengan sekretariat yang dibentuk sebagai *Supporting system* dan menjadi pengguna anggaran pemerintah. *Keempat*, dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Baitul Mal Aceh masih menuai kontroversial. *Kelima*, kondisi selama ini masih kurang tegas masalah pengaturan zakat sebagai belanja barang dan jasa pada APBA dalam wujud pengaturan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, evaluasi dan monitoring zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.⁸⁰

⁷⁹ Sri Endang Rahayu, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.11 No.02 Oktober 2011.

⁸⁰ Armiadi Musa, “Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.18, No.03, Desember 2016 .

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan Tria Dessi Putri, Toto Gunarto, Saimul dengan jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perkembangan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000-2013”. Penelitian ini memiliki tiga variabel dimana dua variabel independen dan satu variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, Investasi pemerintah (belanja modal pertenaga kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi lampung. *Kedua*, Investasi swasta (realisasi PMA dan PMDN pertenaga kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi lampung. *Ketiga*, Penerimaan asli daerah (PAD Pertenaga Kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi lampung.⁸¹

Kemudian penelitian yang dilakukan Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah dengan jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur”. Penelitian ini memiliki 7 variabel dimana terdapat empat variabel independen dan tiga variabel dependen. Hasil dari penelitian ini yaitu Regresi berganda menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian secara langsung untuk pengaruh

⁸¹ Tria Dessi, Toto Gunarto, Saimul, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Perkembangan Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2000-2013”. *Jurnal*

pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran. Hasil penelitian secara tidak langsung PAD terhadap kemiskinan adalah sebesar 9,66% dan pengangguran sebesar 16,95% sedangkan DAU terhadap kemiskinan adalah sebesar 4,9% dan terhadap pengangguran sebesar 8,6%.⁸²

Hasil penelitian dari beberapa penelitian terdahulu memiliki perbedaan seperti menurut Cherry Dhea Wenny bahwa secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, dimana pada penelitian ini terfokus pada kinerja keuangan sedangkan dalam penelitian peneliti saat ini terfokus pada pertumbuhan ekonomi dan penelitian sebelumnya dari Tria Dessi Putri, Toto Gunarto, Saimul menunjukkan hasil penelitian yang lebih terfokus pada Investasi Pemerintah (belanja modal pertenaga kerja) , Investasi swasta (realisasi PMA dan PMDN pertenaga kerja) dan Penerimaan asli daerah (PAD Pertenaga Kerja) yang lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

Adanya perbedaan dari hasil penelitian disebabkan berbedanya potensi yang dimiliki setiap daerah sehingga peneliti ingin meneliti apakah Pendapatan Asli

⁸² Anis Setyawati, Ardi Hamzah. “*Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur*”, *Jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Desember 2007, h. 226

Daerah dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2005-2017 dan berbeda hasil penelitian dengan penelitian terdahulu.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁸³ Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya, bahwa pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan.

Pengeluaran tersebut digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi.⁸⁴ Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui pembangunan di

⁸³ Sugiono, *Op.Cit*, h. 60

⁸⁴ Umdatul Husan, “*Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota se Jawa Tengah*” skripsi program studi ekonomi pembangunan , Universitas Diponegoro,Semarang. h.29

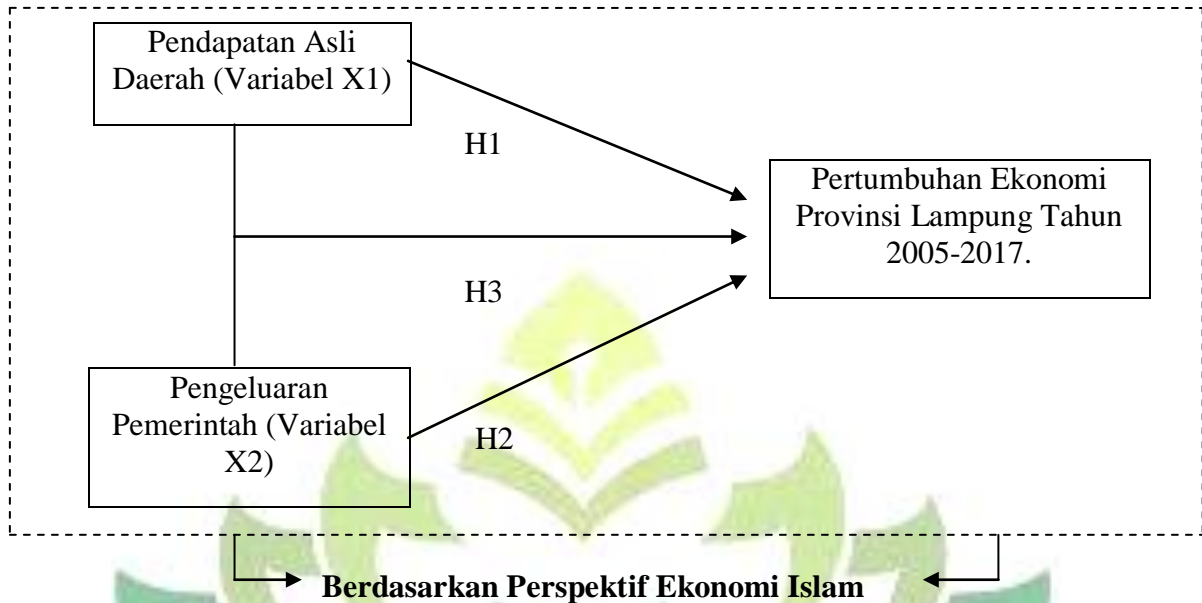
beberapa sektor maka aliran penerimaan pemerintah melalui Pendapatan Asli Daerah meningkat.

Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam bahwa anggaran pendapatan Negara merupakan sumber dana yang digunakan oleh pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga pengoptimalan potensi sumber-sumber penerimaan Negara haruslah digali secara optimal agar dapat mencukupi kebutuhan Negara dan dapat mendistribusikan pendapatan Negara dalam hal Pengeluaran anggaran belanja secara merata di kalangan masyarakat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits demi kemaslahatan seluruh umat Muslim.

Untuk memudahkan penelitian yang akan dilakukan maka peneliti ingin memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel X_1 dan Pengeluaran Pemerintah sebagai variabel X_2 dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2005-2017 sebagai variabel Y. Dalam hal ini variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah yang akan diuji apakah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dengan menggunakan Regresi Linier Berganda. Maka disusun lah kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.



G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.⁸⁵

Oleh karena itu berikut hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini :

1. Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017.

Menurut Sudono Sukirno, pembangunan daerah merupakan program yang perlu melibatkan unsur lapisan masyarakat. Peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator perlu

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Kombinasi* (Bandung : Alfabet, 2014), h. 99

membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan serta meningkatkan kegiatan perekonomian diberbagai sektor, sehingga dapat merangsang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.⁸⁶

Salah satu bentuk dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi menurut Islam dikenal dengan pola dan mekanisme distribusi yang sangat jelas dan telah di atur dalam Al-Qur'an. Bentuk distribusi harta tersebut ada yang berbentuk kewajiban berupa Zakat dan Infaq serta ada yang berbentuk sunnah dan mubah yang berupa Shadaqah, wakaf dan hadiah.

Penelitian yang dilakukan Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah dengan jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.⁸⁷ Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

⁸⁶ Umdatul Husna, “*Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota se-Jawa Tengah*” Skripsi Program ekonomi pembangunan, Universitas Diponegoro, 2015, h. 29

⁸⁷ Anis Setyawati, Ardi Hamzah. “*Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur*”, *Jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Desember 2007, h. 226

H_0 : Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017.

H_1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017.

2. Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017.

Hubungan pengeluaran pemerintah terhadap perkembangan ekonomi menurut Rostow bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya.⁸⁸ Dalam teori Wagner, mengemukakan bahwa suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relative pengeluaran pemerintah meningkat.

Pengeluaran pemerintah berupa pengeluaran pembangunan dan pelayanan publik yang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian pada sektor-sektor usaha sehingga penerimaan pajak akan naik atau disebut kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya akan dikelola kembali oleh pemerintah dalam hal pembangunan dan pelayanan publik.

⁸⁸ Mangkoesoebroto, *Op.Cit*, h.170

Al-Qur'an menjelaskan bagaimana peranan Negara dalam hal pemerataan distribusi pemerataan. Al-Qur'an surah Al-Hasyr : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada rasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk beberapa Negeri adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang ada dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diebrikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya” (Q.S Al-Hasyr 59:7)

Menurut Yusuf Qordhowi dalam Sumar'in, garis besar fungsi Negara dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Negara berfungsi menjamin segala kebutuhan minimum rakyat.
2. Negara berfungsi mendidik dan membina masyarakat. Seperti menyediakan fasilitas infrastruktur , regulasi, institusi sumber daya manusia, pengetahuan sekaligus kualitasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Endang Rahayu yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu X1 pada

Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.⁸⁹ Maka hipotesis dalam penelitian ini:

H_0 : Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017.

H_1 : Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017.

Menurut Mankiw dalam Ardiyanto (2012), menyebutkan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan akan menyebabkan permintaan agregat. Permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat dalam perekonomian suatu daerah.⁹⁰

Pemerintahan Islam tidak hanya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti dilakukan oleh pemerintahan modern tetapi juga

⁸⁹ Sri Endang Rahayu, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.11 No.02 Oktober 2011.

⁹⁰ Febrian Dwi Prakarsa, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012)", *Jurnal Ekonomi*, 2014. h. 3

memainkan peran yang efektif, sesuai dengan karakteristik Islam, dalam pembangunan moral dan spiritual masyarakat Muslim.⁹¹ Al-Qur'an telah menetapkan suatu kebijakan mengenai pendapatan yang didapatkan melalui Zakat dan pengeluaran yang di distribusikan berimbang diantara berbagai lapisan masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang merata.

Penelitian yang dilakukan oleh M Ribai Subhanda Lubis yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kota Padangsidimpuan Tahun 2004-2009”. Hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pembangunan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kota Padangsidimpuan tahun 2004-2009.

Maka hipotesis dalam penelitian ini :

H_0 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017.

H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017.

⁹¹ Eko Suprayitno, *Ibid*, h.174

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁹²

Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) penelitian yang bertujuan mendapatkan data sekunder dengan cara menelaah terhadap buku, majalah, koran, dll yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁹³ Dimana penelitian ini membahas dan mendeskripsikan tentang bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah sebagai variabel bebas terhadap Perkembangan Ekonomi sebagai variabel terikat.

⁹² Sugiyono, *Op.Cit*, h.11

⁹³ Sugiyono, *Ibid*, h.9

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan yaitu Data Sekunder, data sekunder berasal dari sumber internal dan eksternal dalam penelitian ini lebih cenderung kepada eksternal yaitu dari data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga artikel, majalah, jurnal, Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data Pendapatan Asli Daerah, data Pengeluaran Pemerintah dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makro ekonomi yang ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu :

- a. Dokumentasi, adalah pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.⁹⁴

Metode dokumentasi ini biasanya bisa melalui foto, hasil rekaman, maupun flashdisk yang peneliti dapat dari objek atau tempat penelitian dan pada penelitian ini seluruh dokumentasi peneliti unggah dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Lampung.

⁹⁴Sugiyono, *Ibid*, h.240

b. Studi Pustaka, adalah teknik pengumpulan data yang digunakan selain menggunakan kepustakaan. Teknik kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulannya.⁹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung pertahun dan data yang didapatkan dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sampel 13 tahun terakhir yaitu tahun 2005-2017.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (Dependen) dan dua variabel bebas (Independen).

1. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Independen). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi

⁹⁵ Sugiyono, *Ibid*, h.119

Lampung. Salah satu indikator dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah / daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha provinsi Lampung periode 2005-2017. Seluruh data didapat dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Lampung yang diambil selama periode 2005-2017.

2. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Dependen). Variabel bebas (Independen) dalam penelitian ini adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah dan data realisasi Pengeluaran Pemerintah yang diperoleh dari data Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Lampung selama periode 2005-2017.

Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala rasio. Skala rasio merupakan skala interval yang memiliki nilai dasar (*Based Value*) yang tidak dapat dirubah. Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Rupiah (Rp). Berikut disajikan Daftar Operasional Variabel Penelitian pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5

Daftar Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Rumus	Skala Pengukuran Variabel
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah	$PAD = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$	Rasio (Rp.)
Pengeluaran Pemerintah (X2)	Total Pengeluaran	$\text{Total Pengeluaran} = \text{Belanja daerah} (\text{Belanja langsung} + \text{Belanja tidak langsung})$	Rasio (Rp.)
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	PDRB (Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan) tahun 2000	Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam periode 2005-2017	Rasio (Rp.)

F. Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.

Data yang diperoleh dilakukan perhitungan-perhitungan terhadap variabel-variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel-variabel pengeluaran

pemerintah. Data tersebut dimaksudkan untuk mengukur tingkat perkembangan perekonomian di Provinsi Lampung.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yaitu tentang analisis bentuk dan tingkat hubungan antar variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen.⁹⁶ Untuk keabsahan data maka digunakan uji asumsi klasik dan hipotesis.

1. Uji Asumsi Klasik

Alat uji Asumsi Klasik digunakan untuk mengetahui apakah terdapat masalah dalam data regresi. Pengujian ini dimaksud untuk mengetahui apakah model yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan bebas atau lolos dari penyimpangan asumsi klasik. Ada empat pengujian dalam asumsi klasik, diantaranya:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.⁹⁷ Metode Uji Normalitas yang digunakan adalah dengan melihat koefisien pada *Jarque-Bera* dan Probabilitasnya. Uji *Jarque-Bera* :

- a) Jika $Sig > 2$ maka data berdistribusi tidak normal.
- b) Jika $Sig < 2$ maka data berdistribusi normal.

⁹⁶ Lukas SetiaAtmaja, *Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta : ANDI, 2011) h.177

⁹⁷ Imam Gozhali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* (Edisi Kelima) (Semarang: Universitas Diponegoro), 2011, h.147

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu penelitian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dan *Residual* dalam satu pengamatan yang lain.⁹⁸ Untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas dapat menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan ketentuan nilai *Probability Chi-Square*.

d. Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas untuk melihat apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen.⁹⁹ Uji Multikolineritas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance inflation factor*) dari hasil regresi.

⁹⁸ Imam Gozhali, *Ibid*, h.125

⁹⁹ Imam Gozhali, *Ibid*, h.95

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji t-Statistik

Uji t-Statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengambilan keputusan uji hipotesis didasarkan pada nilai probabilitas sebesar 5% yang didapatkan dari hasil pengolahan data *E-views* 9 dengan kesimpulan sebagai berikut :

a) Jika Probabilitas $> 0,05$ maka H_1 ditolak.

b) Jika Probabilitas $< 0,05$ maka H_1 diterima.¹⁰⁰

b. Uji F Statistik

Uji F Statistik adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel tidak bebas. Uji ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen (X_1 dan X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan keputusan dilihat dari statistik parametrik dan didapatkan dari hasil pengolahan data *E-views* 9 sebagai berikut :

a) Jika probabilitas $< 0,50$ maka H_1 ditolak.

b) Jika probabilitas $> 0,50$ maka H_1 diterima.¹⁰¹

¹⁰⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, edisi revisi ke-2, (Bandung: Raja Grafindo Persada) 2010, h.27

c. Koefisien Determinasi

Pada model linier berganda ini akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas untuk bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2). Jika Determinasi totalnya (R^2) yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikatnya, begitupun sebaliknya jika determinasi totalnya (R^2) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Uji Regresi Linier berganda merupakan teknik analisis untuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif. Analisis regresi yang bertujuan untuk mempelajari “pengaruh” variabel bebas (*Predictor*) terhadap variabel terikat (*Criterion*).¹⁰²

Model 1 bertujuan untuk menguji apakah variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Perkembangan Ekonomi, yaitu :

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e^{103}$$

Keterangan :

¹⁰¹ *Ibid*, h.27

¹⁰² D.r. Kadir, M.Pd, *Statistik Terapan (Konsep, Contoh dan Analisis Data Dengan Program SPSS /Lisrel Dalam Penelitian)*, (Depok: Raja Grafindo Persada) 2015, h.175

¹⁰³ Usman, Husnaini dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2003, h.247

Y = Perkembangan Ekonomi

b_0 = konstanta

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Pengeluaran Pemerintah

$b_1 - b_2$ = koefisien regresi

e = eror term



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung

1. Sejarah Singkat Provinsi Lampung

Provinsi Lampung Lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibu kota Tanjung Karang-Teluk Betung. Selanjutnya Kotamadya Tanjung Karang-Teluk Betung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983. Secara administrasi Provinsi Lampung dibagi 14 Kabupaten/Kota.

2. Letak Geografis Provinsi Lampung

Provinsi Lampung memiliki luas 35.288,35 Km² termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling ujung tenggara pulau Sumatera dan dibatasi oleh :

- a. Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di Sebelah Utara.
- b. Selat Sunda di Sebelah Selatan
- c. Laut Jawa di Sebelah Timur
- d. Samudera Indonesi di Sebelah Barat

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung memiliki

wilayah yang relative luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti pasar ikan (Teluk Betung), Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka ada Kota Agung, dan di laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti labuhan Manggarai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan yang menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudera Indonesia terdapat pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah “Raden Intan II” yaitu nama baru dari “Branti”, 28 Km dari ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi dan lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.

Secara geografi Provinsi Lampung terletak pada kedudukan : Timur - Barat berada antara $103^{\circ} 40'$ – $105^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Utara – Selatan berada antara: $6^{\circ} 45'$ - $3^{\circ} 45'$ Lintang Selatan.

3. Potensi Pengembangan Wilayah

dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang baik dari arah Pulau Sumatera maupun dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2010 menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029.

4. Tinjauan Ekonomi di Provinsi Lampung

Masyarakat pesisir Lampung lebih banyak bermata pencaharian nelayan dan bercocok tanam. Sedangkan masyarakat tengah lebih banyak berkebun lada, kopi, cengkeh, kayu manis, dan lain-lain. Lampung fokus pada pengembangan lahan bagi perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu, dan lain-lain. Dan di beberapa daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang lebih menonjol, bahkan untuk tingkat nasional dan internasional. Selain hasil bumi Lampung juga merupakan kota pelabuhan karena Lampung adalah pintu gerbang untuk masuk ke pulau Sumatera. Dari hasil bumi yang melimpah tumbuhlah banyak industri-industri seperti di daerah pesisir panjang, daerah natar, tanjung bintang, Bandar jaya, dan lain-lain.

5. Sarana dan Prasarana di Provinsi Lampung

a. Jalan Raya

Jalan untuk dapat mengakses Provinsi Lampung, dari Aceh dapat menggunakan jalur darat melalui jalan Lintas Tengah Sumatera, jalan Lintas Timur Sumatera, jalan Lintas Barat Sumatera dan jalan Lintas Pantai Timur Sumatera.

b. Jalan Tol

Pembangunan jalan tol Bakauheni-Bandar Lampung-Terbanggi Besar yang telah dimulai pengerjaannya sejak 30 April 2015, dari Bakauheni (Lampung Selatan) hingga Terbanggi Besar (Lampung Tengah) sepanjang

139 kilometer yang direncanakan beroperasi penuh ditahun 2018. Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) tengah mempersiapkan pembangunan jalan tol kawasan Bakauheni-Palembang. Jalan tol ini, nantinya akan terdiri dari 3 kawasan ruas tol.

c. Pelabuhan

Di provinsi ini terdapat Pelabuhan Panjang yang merupakan pelabuhan ekspor-impor bagi Lampung dan juga Pelabuhan Srengsem yang menjadi pelabuhan untuk lalu lintas distribusi batu bara dari Sumatera Selatan ke Jawa. Sekitar 92 Km dari selatan Bandar Lampung, ada Bakauheni, yang merupakan sebuah kota pelabuhan di Provinsi Lampung, tepinya di ujung selatan Pulau Sumatera. Terletak di ujung selatan dari Jalan Raya Lintas Sumatera, pelabuhan Bakauheni yang menghubungkan Sumatera dengan Jawa via perhubungan laut.

d. Bandar Udara dan Darat

Menggunakan jalan udara, melalui Bandar Udara Radin Inten II yang menghubungkan Lampung dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Selanjutnya dengan menggunakan jalur darat provinsi Lampung memiliki Kereta Api dengan jalur Bandar Lampung-Palembang merupakan bagian dari jaringan jalur kereta api di Sumatera bagian Selatan yang dioperasikan oleh PT. Kereta Api (Persero) Divre III Sumatera Selatan yang berkedudukan di Palembang dengan 40 stasiun di sepanjang 387,872 Km

terbentang antara Stasiun Tanjung Karang di Bandar Lampung sampai Stasiun Kertapati di Palembang.

B. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen baik secara parsial dan simultan :

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4.6

Hasil Uji Normalitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017

sampel	<i>Jarque-Bera</i>	<i>Probability</i>	simpulan
13	0,068433	0,966362	Data berdistribusi normal

Sumber: *Output Eviews 9 Data Diolah 2018*

Hasil output *eviews 9* pada tabel di atas menunjukkan bahwa hasil *Jarque-Bera* sebesar 0,068433 atau (< 2), maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. Kemudian nilai *Probability* diperoleh sebesar 0,966362 atau ($>5\%$) maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Table 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017

Variabel	Centered VIF (<i>Variance Inflation Factor</i>)	Simpulan
Pendapatan Asli Daerah (X1)	5,346720	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengeluaran Pemerintah (X2)	5, 346720	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output Eviews 9 Data Diolah 2018

Hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan tabel di atas dengan melihat nilai VIF (*variance inflation factor*), *output eviws* menunjukkan bahwa variabel PAD dan Pengeluaran Pemerintah memiliki nilai VIF 5,346720 lebih kecil dari 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat hubungan linier antara kedua variabel atau tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017

Sampel	Variabel	<i>Prob. Chi-Square</i>	Simpulan
13	X1 dan X2	0,7702	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Output Eviews 9 Data Diolah 2018

Hasil *output eviws* pada tabel di atas menunjukkan nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0,7702 atau lebih besar dari 5% (>5%) maka dapat

diartikan bahwa data yang digunakan tidak mengandung masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.9

Hasil Uji Glejser Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017

Variabel	<i>Prob. Chi-Square</i>	Simpulan
X1	0,2326	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X2	0,2278	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output Eviews 9 Data Diolah 2018

Hasil *output eviews* pada tabel di atas menunjukkan nilai *Prob. Chi-Square* pada X1 sebesar 0,2326 atau lebih besar dari 5 % (>5%) dan nilai *Prob. Chi-Square* pada X2 sebesar 0,2278 atau lebih besar dari 5% (>5%) maka dari kedua variabel tersebut mengindikasikan bahwa data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.10

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017

Variabel	Koefisien	Std. Error	T-statistik	Prob.
Konstanta	-9,521788	4,786438	-1,989326	0,0747
Pendapatan Asli Daerah (X1)	1,162287	0,383748	3,028773	0,0127
Pengeluaran Pemerintah (X2)	0,319944	0,294239	1,087360	0,3024
<i>R-Squared</i>	0,897038			
<i>Prob (F-statistic)</i>	0,000012			

Sumber: Output Eviews 9 Data Diolah 2018

Formulasi persamaan regresi berganda dari variabel PAD dan pengeluaran pemerintah adalah:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

$$Y = -9,521 + 1,162 \cdot X_1 + 0,319 \cdot X_2$$

Dimana:

A= konstanta -9,521

$b_1 = 1,162$

$X_1 = \text{PAD}$

$b_2 = 0,319$

$X_2 = \text{Pengeluaran Pemerintah}$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar -9,521 menyatakan bahwa jika PAD dan pengeluaran pemerintah dianggap konstan atau sama dengan 0 maka besarnya pertumbuhan ekonomi adalah -9,521 %. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran pemerintah dalam kondisi konstan (0) maka Pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung akan turun -9,521 %
- b) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi PAD sebesar 1,162 artinya jika PAD mengalami kenaikan 1 %, maka akan meningkatkan pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,162 %. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan yang searah antara

PAD dan Pertumbuhan Ekonomi, maka apabila nilai PAD meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

- c) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan nilai koefisien regresi untuk pengeluaran pemerintah sebesar 0,319, artinya jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,319 % dan Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan yang searah antara pengeluaran pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi, maka apabila nilai pengeluaran pemerintah meningkat maka nilai pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada PAD, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2005-2017. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel di atas.

Hasil uji signifikansi untuk uji parsial (Uji t) pada Variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah) memperoleh nilai *Coefficient* sebesar 1,162287 nilai *t-statistic* sebesar 3,028773 dan nilai *probability* sebesar 0,0127 atau (<5%) maka variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017). Dan variabel X2

(Pengeluaran Pemerintah) memperoleh nilai *Coefficient* sebesar 0,319944 , nilai *t-statistic* sebesar 1,087360 dan nilai *probability* sebesar 0,3024 atau (>5%) maka variabel X2 (Pengeluaran Pemerintah) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017).

Hasil penelitian bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara variabel Pendapatan Asli Daerah dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung dan bernilai negatif yang berarti terjadi hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung. Pada dasarnya Jika semakin besar Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran pemerintah maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017. Sebaliknya, jika semakin kecil Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran pemerintah maka pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017 mengalami penurunan.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran pemerintah) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat (Pertumbuhan Ekonomi).

Hasil uji signifikansi untuk uji serempak (Uji F) memperoleh nilai *probability F statistic* sebesar 0,000012 (<5%) maka secara bersama-

sama/serempak variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah) dan X2 (Pengeluaran Pemerintah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menunjukkan variabel dependen terbatas. Artinya uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

Berdasarkan *output eviws 9* menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,897038 atau 89,70%. Hal ini menunjukan besarnya kemampuan variabel bebas adalah sebesar 89,70%, sehingga dapat diartikan bahwa variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah) dan variabel X1 (Pengeluaran Pemerintah) mempengaruhi variabel Y (Pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017) sebesar 89,70%, sisanya sebesar 10,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

C. Pembahasan.

1. Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017.

Pada penelitian ini hasil uji signifikansi untuk uji parsial (Uji t) pada Variabel Pendapatan Asli Daerah memperoleh nilai *Coefficient* sebesar 1,162287, nilai *t-statistic* sebesar 3,028733 dan nilai *probability* sebesar 0,0127 atau (<5%) maka variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Taosige Wau dan Jhon Firman Fau yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Nias Selatan”. Kesimpulan dalam penelitian tersebut bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi variabel dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya penelitian ini pun sejalan dengan hasil penelitian Hasdi Aimon dan Rova Luarta Putra yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan

Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Sumatera Barat” dalam penelitian ini variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Artinya, setiap peningkatan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dan APBD. Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dan APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintahan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Jika secara teori hubungan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi merupakan hubungan secara fungsional. Dimana semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka pertumbuhan akan meningkat dikarenakan adanya penerimaan daerah yang didapatkan dari pajak dan retribusi daerah maka terjadilah peningkatan pengeluaran pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan. Maka dalam hal ini peneliti mengasumsikan bahwa pemerintah cukup baik dalam menjalankan tugasnya

agar masyarakat provinsi Lampung patuh dalam membayar pajak dan retribusi daerah, serta kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah tersebut kedalam program-program pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Pada data realisasi Pendapatan Asli Daerah pemerintah provinsi Lampung mengalami kenaikan di setiap tahun dan penurunan terjadi di tahun 2009 dan 2015, namun penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun tersebut tidak terlalu signifikan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11
Data Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
Tahun 2005-2017 (Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2005	Rp. 549.657.848	Rp. 463.358.783	Rp. 48.511.983	Rp. 7.300.729	Rp. 25.486.352
2006	Rp. 631.981.956	Rp. 507.987.600	Rp. 65.251.390	Rp. 7.556.222	Rp. 51.186.744
2007	Rp. 674.693.662	Rp. 567.498.747	Rp. 61.552.449	Rp. 9.883.550	Rp. 35.758.916
2008	Rp. 891.781.561	Rp. 774.613.920	Rp. 71.175.337	Rp. 11.205.126	Rp. 34.787.177
2009	Rp. 860.357.826	Rp. 725.464.224	Rp. 75.266.015	Rp. 12.137.116	Rp. 47.490.471
2010	Rp. 1.118.340.908	Rp. 951.315.482	Rp. 7.059.463	Rp. 12.869.366	Rp. 147.095.597
2011	Rp. 1.395.675.720	Rp. 1.199.945.830	Rp. 8.689.231	Rp. 19.398.638	Rp. 167.642.021
2012	Rp. 1.687.701.199	Rp. 1.465.711.125	Rp. 8.209.834	Rp. 21.270.703	Rp. 192.509.537
2013	Rp. 1.771.287.932	Rp. 1.547.326.214	Rp. 8.672.978	Rp. 25.144.918	Rp. 190.143.822
2014	Rp. 2.274.685.553	Rp. 1.946.452.924	Rp. 9.253.336	Rp. 25.462.846	Rp. 293.516.447
2015	Rp. 2.247.342.668	Rp. .963.322.717	Rp. 10.376.054	Rp. 25.715.957	Rp. 247.927.940

2016	Rp. 2.368.796.249	Rp. 2.051.836.519	Rp. 7.184.465	Rp. 26.696.866	Rp. 283.078.399
2017	Rp. 2.750.582.686	Rp. 2.451.408.220	Rp. 7.322.619	Rp. 27.522.159	Rp. 264.329.688

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2005-2017.

www.lampung.bps.go.id

Berdasarkan Tabel 4.11 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah pemerintah provinsi Lampung mengalami kenaikan disetiap tahunnya namun tidak terlalu signifikan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah terdapat pada tahun 2009 dimana Pendapatan Asli Daerah tahun 2008 sebesar Rp. 891.781.561 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 860.357.826 dan penurunan terjadi di tahun 2015, jika dilihat Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.274.685.553 pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp. 2.247.342.668.

Menurut M Ribai Subhanda Lubis, secara garis besar usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi adalah dengan meluaskan jaringan objek Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Intensifikasi adalah dengan mengoptimalkan penerimaan dari objek Pendapatan Asli Daerah yang ada.

Menurut Eka Siwi Hidayati dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2005-2010” bahwasanya secara konseptual perubahan pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran atau belanja, namun tidak selalu seluruh kenaikan pendapatan dialokasikan untuk belanja modal yang seharusnya jadi bagian dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah namun seluruh pengeluaran kembali kepada kebijakan pemerintah yang mengalokasikan pendapatan dan sumber-sumber dana lainnya untuk kebutuhan daerah tersebut.

Maka dengan ini peneliti mengasumsikan bahwa hasil penelitian dimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017 dikarenakan pemerintah mengelola dengan baik potensi-potensi sumber daya alam yang ada dan menjadikannya sebagai pemacu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang di tarik pemerintah daerah. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Jika dilihat dari daftar tabel 1.1 tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Lampung Tahun 2005-2017. Lapangan usaha dengan nilai tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, angka ini terus mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Lapangan usaha pemberi *share* terbesar kedua adalah Industri Pengolahan, sektor ini mengalami kenaikan selama 13 tahun berturut-turut. Kategori Industri Pengolahan meliputi 16

Industri, yaitu; Industri batubara, Industri makan dan minum, Industri pengolahan tembakau, Industri tekstil, Industri logam, Dll. Lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda memberikan kontribusi terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Provinsi Lampung tahun 2005-2017, sedangkan jenis usaha lainnya ada yang mengalami kenaikan namun kenaikan ini hanya beberapa persen dan relative kecil.

Kemungkinan kondisi inilah yang menyebabkan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi provinsi Lampung karena pada indikator PDRB menurut lapangan usaha berdistribusi secara baik untuk merangsang peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang nanti nya dana Pendapatan Asli Daerah tersebut akan dialokasikan ke pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan suatu ekonomi daerah seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada di provinsi Lampung yang nantinya juga akan meningkatkan PDRB menurut lapangan usaha.

2. Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017.

Pengeluaran pemerintah seperti yang tertuang dalam belanja APBD yang dibagi dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Maka sudah semestinya jika pengeluaran pemerintah digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada penelitian ini hasil uji signifikansi untuk uji parsial (Uji t) pada Variabel Pengeluaran Pemerintah memperoleh nilai *Coefficient* sebesar 0,319944, nilai *t-statistic* sebesar 1,087360 dan nilai *probability* sebesar 0,3024 atau (>5%) maka variabel X2 (Pengeluaran pemerintah) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Y (pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti variabel Pengeluaran Pemerintah dalam penelitian tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017.

Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Gabriela Brigita Desire Mosey, Rosalina Koleangan dan Richard Tumilaar berjudul “Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2004-2013” hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2004-2013.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori yang ada, seharusnya dalam perencanaan pembangunan dalam era otonomi daerah saat ini justru sangat diperlukan peran pemerintah yang sebaiknya mampu untuk

merangsang dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan suatu ekonomi daerah.

Menurut teori Wagner mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan perkapita meningkat secara relative meningkatkan pengeluaran. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Sedangkan menurut teori Peacock dan Wiseman bahwa pemerintah memiliki peran sebagai katalisator dan fasilitasor sehingga membutuhkan anggaran belanja untuk melaksanakan pembangunan, pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan diberbagai jenis infrastruktur yang penting. Sehingga pembelanjaan-pembelajaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi.

Lebih jelasnya pada Tabel 4.12 Pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Lampung yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan.

Pengeluaran pemerintah dari tahun 2005-2017 selalu mengalami kenaikan terus-menurus dan sangat signifikan. Namun dalam data realisasi pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjurus kepada belanja tidak langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja

bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Dari seluruh belanja tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah berperan dalam pembelanjaan yang tidak terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit untuk diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yaitu dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Menurut Andaiyani, menyatakan bahwa kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik mempengaruhi besarnya belanja modal. Sehingga pemerintah daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Seperti pemanfaatan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan baik itu rutin maupun fisik. Dengan naiknya belanja tidak langsung hal ini berarti pemerintah cenderung menurunkan alokasi dananya untuk belanja yang terkait erat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung.

Hasil penelitian yang ada dimana Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017 maka peneliti mengasumsikan bahwa hal yang menyebabkan variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

provinsi Lampung tahun 2005-2017 dikarenakan kontribusi Belanja Tidak Langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga lebih tinggi dibandingkan Belanja Langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sehingga alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah belum maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung sebaiknya pemerintah perlu meningkatkan anggaran Belanja Langsung sehingga tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah akan mudah dicapai.

3. Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, apabila pengeluaran pemerintah digunakan untuk penyediaan pelayanan publik dan barang barang publik dengan cara melakukan pembangunan hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah tersebut dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Meningkatkan kegiatan ekonomi membuat pemerintah akan mengenakan pajak dan retribusi sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran pemerintah) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung sebagai variabel terikat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan model regresi linier berganda dimana menggunakan Uji Signifikan Simultan (Uji F) diperoleh hasil uji signifikansi untuk uji serempak (Uji F) memperoleh nilai *prob. F statistic* sebesar 0,000012 (<5%) maka secara bersama-sama/serempak variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah) dan X2 (Pengeluaran Pemerintah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah) dan X2 (Pengeluaran Pemerintah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017).

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan M Ribai Subhanda Lubis berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kota Padangsidimpuan Tahun 2004-2009” yang menyatakan bahwa antara variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan variabel Pengeluaran Pembangunan (X2)

secara bersama berpengaruh terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kota Padangsidimpuan tahun 2004-2009 (Y).

Menurut Huda, kebijakan pengeluaran pemerintah adalah unsur kebijakan fiskal dimana pemerintah atau Negara membelanjakan pendapatan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dengan kebijakan pengeluaran inilah Negara dapat melakukan proses distribusi pendapatan daerah tersebut kepada pembangunan seperti infrastruktur, sarana dan prasana yang akan menunjang perkembangan ekonomi daerah terus meningkat.

4. Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.

Dalam pandangan Ekonomi Islam pembangunan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Negara tersebut. Pembangunan Islam pula tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur tetapi pembangunan secara moral dan spiritual setiap masyarakat sangat diperlukan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pastinya membutuhkan dana yang dimana dana tersebut bersumber dari penerimaan daerah. Karena agar dapat terlaksana kegiatan pembangunan tersebut pemerintah harus mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah secara baik dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Dalam pandangan Islam untuk mencapai suatu

kesejahteraan (*Falah*) tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.

Pengoptimalan potensi penerimaan pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat terealisasinya penerimaan di Negara Islam sehingga pemerintah mampu mendistribusikan penerimaan tersebut secara adil dan merata dan tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Sama halnya dengan pemahaman ekonomi konvensional, dalam ekonomi Konvensional indikator makro ekonomi seperti PDRB memiliki pengaruh terhadap penerimaan pemerintah (PAD) dan pengeluaran pemerintah. PDRB dalam pembahasan ekonomi Islam dapat dijadikan satu ukuran untuk melihat kesejahteraan masyarakatnya dengan menggunakan parameter *Falah* didalamnya.

Hubungan PDRB/PDB dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah dalam pandangan ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan teori ekonomi konvensional, dalam ekonomi Islam peningkatan PDB Riil atau PDRB dapat mempengaruhi pendapatan setiap masyarakat sehingga akan berdampak pula terhadap penerimaan zakat maupun pajak lainnya sehingga penerimaan pemerintah ikut meningkat, dimana penerimaan meningkat maka pemerintah akan melakukan pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan. Dengan begitu dapat dengan mudah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi serta menstabilkan ekonomi yang baik.

Karena seperti yang dijelaskan dalam kita suci Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya: *"Dan dirikalah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku' lah bersama orang-orang ruku'"* dalam penjelasan ayat diatas bahwa setiap hambanya untuk membayar zakat secara patuh. Apabila masyarakat patuh patuh dalam membayar pajak maupun zakat maka penerimaan pemerintah yang didedikasikan dalam bentuk pengeluaran pemerintah guna pembangunan ekonomi dapat terealisasi dengan baik dan berkelanjutan.

Hasil penelitian yang dilakukan di provinsi Lampung pada tahun 2005-2017 menjelaskan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung. Hal ini mengasumsikan bahwa pemerintah secara baik mengoptimalkan penerimaan pemerintah atau Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk pembelanjaan-pembelanjaan yang dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah demi pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah dalam Islam dimana pemerintahan Islam pada masa Rasulullah telah menetapkan sumber pendapatan primer yang terdiri dari Zakat dan Úshr (zakat hasil pertanian), serta pendapatan sekunder yang terdiri dari uang tebusan, Khumus, *Amwal Fadilah*, Wakaf, Nawaib, Zakat Fitrah dan lain-lain. Dari pendapatan tersebut tentunya dialokasikan untuk kebutuhan dalam menunjang stabilitas dakwah dan pergerakan Islam.

Kesediaan orang muslim untuk menunaikan zakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam dan akan mendapatkan kebahagiaan. Dijelaskan dalam Al-Qur-an Surah At-Taubah ayat 11.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : *“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”*. Q.S At-Taubah: 11)

Zakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena, menjalankan harta yang didiamkan, distribusi pendapatan bagi kaum miskin dan kaya serta meningkatkan permintaan agregat dalam skala ekonomi makro.

Di masa Rasulullah merupakan kepala Negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dalam bidang keuangan pada abad ke-7 yakni semua pendapatan Negara dikumpulkan terlebih dahulu dalam sebuah lembaga yang dikenal dengan istilah Baitul Maal baru kemudian dibelanjakan sesuai kebutuhan Negara. Jadi, status harta itu adalah milik Negara.

Untuk pengelolaan Negara ataupun daerah diperlukan adanya suatu pemerintahan yang mampu menyediakan sarana pertahanan, membuat hukum serta mempertahankannya, menjamin keadilan, serta menyediakan sarana publik. Untuk memenuhi semua ini Negara membutuhkan *Income*, salah satu *income* Negara adalah pajak, namun pajak juga harus memperhatikan

pemanfaatan serta kemampuan masyarakat membayarnya sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat.

Pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya, maka pemerintah harus mampu mengelola pajak yang didapatkan dari masyarakat. Provinsi Lampung sejak tahun 2005-2017 terus mengalami pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, yang berarti dalam Islam pemerintah provinsi Lampung mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan Allah, serta pemerintah diharapkan bertanggung jawab atas seluruh *income* yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat provinsi Lampung di distribusikan secara adil dan merata dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah harus lebih memperhatikan dana yang didapatkan dari sumber Pendapatan Asli Daerah lebih kepada pembelanjaan-pembelanjaan yang bersifat membangun dan merangsang perekonomian di daerah tersebut. Sedangkan pengeluaran pemerintah dalam ekonomi Islam sangatlah memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi Islam pun tercapai.

Konsep Pengeluaran Pemerintah pada masa Rasulullah pengeluaran Negara pada saat itu di distribusikan untuk keperluan antara lain biaya pertahanan, penyaluran zakat kepada mustahiq, pembayaran gaji, pembayaran upah para sukarelawan, pembayaran utang Negara dan bantuan untuk musafir.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq dalam mendistribusikan harta Baitul Maal, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu dengan sahabat yang baru memeluk Islam.

Pada masa pemerintahan Islam telah ditetapkan bahwasanya pengeluaran suatu Negara haruslah adil dan merata dan ditujukan untuk kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Harta yang telah dititipkan Allah hendaknya diamankan dengan sebaik mungkin bukan dihambur-hamburkan ataupun pemborosan dalam mengelola keuangan. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qurán Surah Al-Isra ayat 26.

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ۝

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (Q.S Al-Isra: 26)

Penjelasan dalam ayat diatas bahwa Allah SWT telah melarang hambahambanya baik perseorangan ataupun lembaga untuk menghambur-hamburkan hartanya terlalu berlebihan. Sebab apabila masyarakat dan pemerintah terlalu boros maka laju pertumbuhan pun akan melambat. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan dana yang didapatkan dari

sumber Pendapatan Asli Daerah lebih kepada pembelanjaan-pembelanjaan yang bersifat membangun dan merangsang perekonomian di daerah tersebut.

Penelitian pada provinsi Lampung dihasilkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak sesuai dengan pandangan ekonomi Islam yang berprinsip bahwa pengeluaran suatu Negara atau daerah harus lah ditujukan untuk pembangunan ekonomi yang nanti nya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola dana *income* pada lembaga Baitul Maal kedalam kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan ini pemerintah provinsi Lampung diharapkan mampu mengelola pendapatan asli daerah untuk dialokasikan kedalam kegiatan ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam Islam apabila perekonomian Negara terus maju maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan terjamin sehingga dapat memacu penerimaan daerah dari segi zakat, sedekah dan penerimaan lainnya, sehingga penerimaan daerah tersebut di alokasikan kembali oleh pemerintah dalam bentuk pengeluaran pemerintah untuk pembangunan secara merata dan adil.

Dalam mengalokasikan sumber penerimaan terhadap pengeluaran tidak serta merta dilakukan untuk pengeluaran tersebut. Ada pengaturan pengeluaran semua ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan dan hukum di Negeranya masing-masing. Seperti Hadits Nabi yang menjelaskan hak pemerintah dalam mengelola zakat, yang artinya: "*Imran bin Husein*

pernah diangkat untuk mengurus/mengelola harta zakat dan ia menceritakan bahwa kami menarik zakat dari pengalaman kami menarik zakat pada zaman Nabi Muhamad SAW begitu juga menyalurkannya” (HR. Bukhari No.1883)¹⁰⁴

Hadist ini menjelaskan bahwa pemerintah memiliki hak dalam memungut zakat sesuai dengan pengalaman pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga dapat tercapainya anggaran Pendapatan Negara yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan di jaman kejayaan Islam.

Dalam islam pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur dan menjalankan perekonomian pemerintahannya agar terjadinya stabilitas ekonomi dan terhindar dari hal buruk yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi yang juga akan berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Setiap *income* yang masuk kedalam lembaga Baitul Maal mempunyai mekanisme masing-masing untuk dikeluarkan atau dibelanjakan oleh Negara, sehingga akan mempunyai dampak positif terhadap perekonomian Negara dan masyarakat.

Dengan begitu akan sejalan pada perspektif ekonomi Islam yang mempunyai pandangan dimana pengeluaran pemerintah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mempengaruhi pula kepada penerimaan pendapatan asli daerah di provinsi Lampung serta dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

¹⁰⁴ Anggun Tri Wahyuni, *Ibid*, h.137

Pandangan Islam pada pertumbuhan ekonomi menurut Ibnu Sina menegaskan akan andilnya manusia yang selalu membutuhkan jasa ekonomi dalam memuaskan kebutuhan hidupnya. Dalam menciptakan stabilitas perekonomian diantaranya asas produksi, distribusi maupun konsumsi dengan cara yang halal dan sah. Bukan hanya itu, tuntutan untuk pengaturan asaa pendapatan juga harusa seimbang dan berorientasi pada pencapaian kesejahteraan di masa depan.¹⁰⁵

Teori pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam mengemukakan beberapa asas salah satunya adalah *Khilafah*. *Khilafah* secara umum dalam hal ini adalah bertanggung jawab sebagai pemegang amanah dari Allah dimuka bumi. Manusia bertanggung jawab dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan dimuka bumi. *Khilafah* dalam pertumbuhan ekonomi yakni mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah untuk mewujudkan maslahah yang maksimum dan mencegah kerusakan-kerusakan dimuka bumi. Dalam hal ini bukan hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab sumber daya alam yang ada namun juga masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga dan mengelola sumber-sumber daya alam yang telah dikaruniakan oleh Allah demi kemaslahatan seluruh masyarakat dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi.

¹⁰⁵ Abdullah Zaky al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 172

Dengan demikian, kebijaksanaan pertumbuhan dalam suatu perekonomian Islam harus ditujukan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dari suatu pertumbuhan ekonomi untuk semua manusia tanpa memandang secara diskriminatif antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam harus memasukkan aspek aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasikan kepada kesejahteraan materi saja melainkan memasukkan juga aspek *Ruhaniyah*.¹⁰⁶



¹⁰⁶ Zainal Abidin, *Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi (Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam atas Sistem Ekonomi Konvensional)*, STAIN Pamekasan. Vol.7 No.2 Desember 2012, h. 364

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam” adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Uji signifikansi untuk Uji Parsial (Uji t-Statistik) pada variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017) yang berarti pemerintah mengelola dengan baik potensi-potensi sumber daya alam yang ada dan menjadikannya sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung.
2. Berdasarkan hasil Uji signifikansi untuk Uji Parsial (Uji t-Statistik) variabel X2 (Pengeluaran Pemerintah) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Y (pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017) yang berarti pemerintah daerah provinsi Lampung dalam mengalokasikan dananya kurang optimal yaitu kontribusi pengeluaran yang berkaitan dengan anggaran belanja langsung atau kebutuhan kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Berdasarkan hasil Uji Simultan (Uji F Statistik) atau Bersama-sama menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran

Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tahun 2005-2017.

4. Dalam ekonomi Islam kaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah provinsi Lampung tahun 2005-2017 berasal dari PAD yang menerapkan sistem pemungutan pajak dengan sistem zakat, sedekah dan penerimaan lainnya sedangkan pengeluaran pemerintah diharapkan mampu mengalokasikan *income* untuk keperluan kegiatan sosial dan ekonomi. Diantara keduanya harus berpegang teguh pada Al-Qurán dan As-Sunnah yang menerapkan prinsip keadilan atau kesamarataan dalam mengambil pemungutan zakat dan pendistribusian pengeluaran tanpa memandang golongan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan ekonomi Islam seperti yang dijelaskan dalam *Q.S At-Taubah:11* tentang perintah membayar zakat sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Sehingga secara ekonomi Islam provinsi Lampung mampu memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya pada Pengeluaran pemerintah provinsi Lampung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan di beberapa tahun anggaran, pengeluaran dana yang dikeluarkan pemerintah tidak berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pandangan Islam setiap Pengeluaran pemerintah perlu didistribusikan pada kegiatan sosial dan ekonomi tanpa menghamburkan ataupun pemborosan dalam mengelola keuangan seperti yang dijelaskan dalam *Q.S Al-Isra:26* tentang larangan pada hamba-hambanya baik secara perorangan atau lembaga untuk menghambur-hamburkan hartanya secara berlebihan guna mencapai kesejahteraan yang adil dan merata.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan pemerintah lebih meningkatkan upaya dalam melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dan haruslah dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan perbaikan fasilitas objek pajak yang ada di seluruh Provinsi Lampung. Selanjutnya, pemerintah harus berusaha meningkatkan dan mengoptimalisasikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan melalui pengembangan usaha-usaha yang mampu menjamin peningkatan produk secara berkelanjutan/jangka panjang seperti sektor pertanian, penggalan dan industry. Pada pengeluaran pemerintah diharapkan pemerintah lebih terfokus untuk mengalokasikan dananya pada anggaran belanja langsung yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti pembangunan sarana dan prasarana, pelayanan publik, kesehatan dan

pendidikan, sehingga dapat memacu percepatan pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung pada tahun-tahun berikutnya.

2. Bagi akademik dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya atau penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambahkan variabel bebas lainnya dan tahun penelitian sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.
3. Bagi publik, dengan hasil penelitian ini diharapkan masyarakat juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah, karena hal tersebut dapat menjadi *Feedback* (timbang balik) kepada masyarakat seperti pembangunan sarana prasarana yang memadai yang dilakukan untuk pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,Zainal, 2012, *Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi (Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam atas Sistem Ekonomi Konvensional)*, STAIN Pamekasan. Vol.7 No.2 Desember.
- Adisasmita,Rahardjo, 2013,*Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah: Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aedy, Hasan, 2011, *Teori dan Aplikasi Ekonomki Pembangunan Perspektif Ekonomi Islam*, Cetakan: Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Almizan, 2016, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Imam Bonjol Padang, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol.1 No.2 Juli-Desember.
- AnitaSari, Merry, Ahmad Soleh. “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*”Jurnal Ekonomi dan Bisnis Review
- Badan Pusat Statistik Jakarta-Indonesia, *Pedoman Praktis Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota*, CV. Chandar Abadi
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi : *Indikartor Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2009*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (Publikasi) : “*Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2005-2017*”, www.lampung.bps.go.id//
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (publikasi), “*Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005- 2017*”, www.lampung.bps.go.id//
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (publikasi), “*Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2005- 2017*”, www.lampung.bps.go.id//
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (publikasi), “*Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2005-2017*”, www.lampung.bps.go.id//
- Bahrudin, Rudi, 2012, *Ekonomina Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Bank Indonesia ; *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Lampung Agustus 2017*
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2011, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet. Ke-10*, Jakarta: Darus Sunnah.
- Dhia, Cherrya Wenny, 2012, “*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupatendan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan*”, Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol. 2 No. 1 September.
- Dwi, Febrian Prakarsa, 2014, “*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap PertumbuhanEkonomi (StudiKasus Di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012)*, Jurnal Ekonomi.
- Fadhly, Faisal, 2016, *Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah?*, JIEP Vol.16, No.2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

- Gozhali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* (Edisi Kelima) Semarang: Universitas Diponegoro
- Guritno, Mangkoesoebroto, 2012, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta : BPFE
- Hasani, Akron, 2010, *Analisis Periode Struktur Perekonomian Berdasarkan Pendekatan Shift Share di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2003-2008*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Huda, Nurul dkk, 2012, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana
- Husnaini, Usman dan Setiadi, 2003, *Pengantar Statistika*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Kadir, 2015, *Statistik Terapan (Konsep, Contoh dan Analisis Data Dengan Program SPSS /Lisrel Dalam Penelitian)*, Depok : Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman, 2015, *Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3*, Jakarta: Rajawali Pers
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 12.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, “*Kajian Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Perekonomian Regional : Provinsi Kepulauan Riau*”
- Mahyuni, 2013 “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Periode 2000-2010*”. Skripsi Ilmu Ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Februari.
- Manik, Rikwan dan Hidayat, Paidi, *Analisis Kasualitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara*. Jurnal keuangan dan bisnis, Vol 2 No.1
- Martono, Nanang, 2010 *Metode Penelitian Kuantitatif*, edisi revisi ke-2, Bandung : Raja Grafindo Persada.
- M. Ribai Subhanda Lubis, 2011, “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kota Padang sidimpuan Tahun 2004-2009*”. Skripsi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Musa, Armiadi 2016, “*Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-undang Pemerintah Aceh*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.18, No.03, Desember.
- M. Zahari MS, 2017 “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi*”, *Jurnal ekonomi dan bisnis*, Vol. 1 No.1 September.
- NurAfiat, Muhammad 2015, “*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara*” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* ,Vol XVI tahun 8, Desember.
- Nurlela, 2018, “*Pengaruh Optimalisasi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kab. OKU Selatan tahun 2006-2017)*” *Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan VII, Edisi IV, Penerbit Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- SetiaAtmaja, Lukas, 2011, *Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta : ANDI.
- Setyawati, Anis, Ardi Hamzah, 2007, “*Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur*”. *Jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Desember.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2013, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi revisi, Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Sri Endang Rahayu, 2011, “*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara*”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.11 No.02 Oktober.
- Sodik, J, 2007, *Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia*, Vol.12, No.1, *Economic Journal of Emerging Markets*.
- Soeharsono, sagir dkk, 2009, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Kencan Permada Media Group.
- Sugiyono. 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta CV
- Sukirno, Sadono, Makroekonomi. 2010, *Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumar'in. 2013, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Suprayitno, Eko, 2009, *EKONOMI ISLAM (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*, Jakarta: Graha Ilmu
- Susanti, Elis, 2017, *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2015 Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Raden Intan Lampung
- Tarigan, Robinson, 2005, *Ekonomi Regional*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Todaro, Michael P. 2009, *Pembangunan Ekonomi*. jilid 1, Edisi Kesebelas Jakarta: Erlangga
- Tri, Anggun, Wahyuni, 2013, “*Pengaruh PDRB, Tingkat Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kota Bandar Lampung pada tahun 2006-2015)*” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Tria Dessi, Toto Gunarto, Saimul, “*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Perkembangan Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2000-2013*”. *Jurnal*
- Yani, Ahmad. 2013, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Zuhdi, Zaenu, *Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Malang DPK di STAI Ma'had Ali Al-Hikam.